



MINGGU | NOVEMBER 2023

● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

# info indonesia

Harga @Rp 20.000,-

## BISAKAH DIA NETRAL?



Road to  
Election  
2024



▶ **BANJIR RESTU**  
UNTUK  
KHOFIFAH  
INDAR  
PARAWANSA

▶ **TIM GANJAR-  
MAHFUD  
RAGUKAN  
NETRALITAS  
PRESIDEN**

▶ **RELA  
LEPAS  
JABATAN  
DEMI  
KURSI**

▶ **PARTAI  
KOALISI  
DI DAERAH  
SIAP  
BERAKSI**

▶ **MENAKAR  
PELUANG AGUS  
FATONI BISA  
JADI GUBERNUR  
SUMSEL**

▶ **USULAN  
HAK ANGKET  
POLEMIK MK  
MAKIN  
RUWET**

“Rasanya akan cukup sulit Presiden Jokowi bertindak netral dalam situasi seperti ini. Ibarat pepatah tak akan terlihat tapi akan bisa dirasakan”

*Surokim Abdussalam*



## Api dalam Sekam

Suasana hangat sepertinya semakin meningkat di akhir tahun 2023 ini. Hadirnya tiga pasangan Bacapres dan Bacawapres membuat masyarakat juga senang karena banyak pilihan, tinggal mana yang sesuai hati nurani mereka. Namun hal itu berbeda dengan para pendukung Bacapres terutama dari kubu Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming. Meski kalangan elit menyatakan biasa-biasa saja namun mereka tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada seperti api dalam sekam yang siap membakar dengan cepat kepada siapa saja yang mendekat.

Secara kasat mata perseteruan kubu Ganjar dan Prabowo terlihat jelas. Ada banyak narasi-narasi negatif yang disampaikan ke publik terkait dua sosok tersebut. Namun yang paling disorot adalah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo.

Keputusan Gibran menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digalang Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Demokrat serta PSI memberi pukulan telak kepada PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Ada pembangkangan nyata yang diperlihatkan Gibran Rakabuming Raka. Tentu hal itu juga tidak lepas dari campur tangan Jokowi.

Jokowi dianggap orang paling bertanggung jawab dibalik keputusan Gibran Rakabuming Raka selaku kader PDIP yang menerima pinangan KIM untuk menjadi Bacawapres. Sehingga sekali lagi meski terlihat suatu hal yang biasa namun tidak baik-baik saja. Ada rekayasa politik yang disusun secara terencana, sistematis, dan masif.

Sehingga baik kubu PDIP yang sudah meradang dengan maneuver Jokowi maupun para pengamat politik tidak yakin kalau Jokowi akan bersikap netral seperti yang digambarkannya di meja makan siang bersama dengan para kandidat Capres 2024.

Banyak pihak yang meyakini Jokowi tidak akan bersikap netral karena secara logika tidak ada seorang bapak yang membiarkan anaknya kalah. Sehingga banyak menyalahkan sikap politik Presiden Jokowi yang melakukan blunder di akhir kekuasaannya.

Di sisi lain nama Gibran Rakabuming juga semakin berisik didengar. Statusnya saat ini adalah sebagai kader PDIP namun pencalonannya tidak direstui partai. Sementara partai lain seperti berlomba untuk meminangnya. Bahkan Partai Golkar dan PSI secara terang-terangan mengajak Gibran bergabung karena dianggap tidak dibutuhkan oleh partainya.

Sementara PDIP sendiri juga tidak mau mengambil resiko dengan memecat Gibran Rakabuming karena hal itu juha menjadi suatu kerugian bagi mereka. Sedangkan Walikota Solo itu juga belum mengambil keputusan apapun terkait statusnya sekarang.

Terkait drama politik Pilpres 2024 tersebut, kami sajikan lengkap di edisi 1 bulan November 2023 ini.

Dari tiga pasangan Capres yang ada sekarang, terlihat tim Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang tidak terlalu berisik. Namun mereka sering dianggap kuda hitam di Pilpres 2024 karena dalam berbagai hasil survey AMIN selalu berada di urutan ketiga.

Seperti hasil survey di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah penentu kemenangan Pilpres 2024, pasangan AMIN ada peringkat ketiga. Di Jatim, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran berdasarkan hitungan survey saat ini berada di peringkat atas dan kedua adalah Ganjar - Mahfud.

Persaingan ini tentu semakin hari semakin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menaklukkan para pesaingnya. Media sosial menjadi salah satu alat yang cukup efektif untuk melakukan kampanye baik positif maupun negative.

Hal ini tentu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak termakan provokasi yang disampaikan di Medsos.

Ada banyak lagi kajian-kajian menarik yang kami sampaikan di edisi kali ini. Kami ucapkan selamat membaca!!!



**info indonesia** INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung  
**PT. DUA SATU PRO**  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

**PENDIRI/ DIREKTUR :** Usman Rizal

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Adam Aulia Manzan Khan **PEMIMPIN REDAKSI:** Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Rahmad Romli

**REDAKTUR PELAKSANA:** Irmayani **REDAKTUR:** Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER:** Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

**KEUANGAN :** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI:** Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

**HARGA IKLAN:** 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

**BANK ACCOUNT:** \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

**PEMASARAN:** Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP :** 0711-7442344



“Jadi netralitas Jokowi saya kira basa-basi saja untuk menetralsir suasana politik yang sudah mulai memanass”

Yusak Farchan

# JOKOWI TAK MUNGKIN NETRAL PRABOWO-GIBRAN DIUNTUNGGAN

**Diplomasi makan siang yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana Negara tidak bisa dikatakan sebagai bentuk netralitas dari kekuasaan.**

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai, persoalan netralitas itu tidak bisa ditunjukkan dengan makan siang.

“Penilaian itu kiranya berlebihan, karena persoalan netralitas tidak cukup diselesaikan melalui makan siang,” kata Jamiluddin, Minggu, 5 November 2023.

Jamiluddin menyampaikan, netralitas itu juga harus buktikan dari sikap Presiden Jokowi. Selain itu, juga harus ditunjukkan dari panggung belakang. Sebab, dalam politik, sikap dan tindakan di panggung depan kerap berbeda dengan apa sesungguhnya yang terjadi di panggung belakang.

“Di panggung depan seolah melakukan sama kepada semua bacapres, tapi di panggung belakang bisa jadi justru sebaliknya,” kata Jamiluddin.

Dia juga berpendapat, agenda makan siang antara Presiden Jokowi dengan ketiga bakal capres tidak bisa dikatakan sebagai sikap negarawan. Di menilai, yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi hanya gimmick politik.

“Karena itu, diplomasi makan siang itu jangan dianggap sebagai sikap negarawan Jokowi. Pertemuan itu cukup dianggap sebagai drama politik yang hanya mempertontonkan panggung depan,” ucap Jamiluddin.

Dia menambahkan, saat ini, Presiden Jokowi hanya memainkan gimmick di depan panggung politik. Sementara itu, para

elite dan masyarakat itu mengetahui pasti gimmick yang akan dimainkan Presiden Jokowi di belakang panggung.

“Panggung belakang masih disembunyikan, dan baru akan diketahui melalui proses waktu,” kata Jamiluddin.

Jadi, kata Jamiluddin, melalui pertemuan itu tidak serta-merta Presiden Jokowi akan netral dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi masih berpotensi untuk ikut cawe-cawe dengan ketiga capres tersebut.

“Peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka,” kata Jamiluddin.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyarankan kepada seluruh elite dan masyarakat turut mengawasi Pilpres 2024. Sebab, hal itu sangat penting untuk mengetahui cawe-cawe yang akan dilakukan Presiden Jokowi di belakang panggung.

“Melalui pengawasan inilah nantinya akan diketahui panggung belakang yang sesungguhnya,” kata Jamiluddin.

Dia menambahkan, permainan panggung Presiden Jokowi itu nantinya bisa menjadi penilaian elite politik dan masyarakat untuk menentukan kenetralan Kepala Negara terhadap Pilpres 2024.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, juga menilai, Presiden Jokowi akan sulit bersikap netral di Pilpres 2024. Sebab, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kini ikut pertarungan.

Apalagi, publik sudah menganggap bahwa Presiden Jokowi akan mengarahkan dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Rasanya akan cukup sulit Presiden Jokowi bertindak netral dalam

situasi seperti ini. Ibarat pepatah tak akan terlihat tapi akan bisa dirasakan,” kata Surokim.

Dia menyampaikan, sedari awal Presiden Jokowi sudah menunjukkan keterarikannya kepada Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo setelah berpasangan dengan Gibran. Hal ini pastinya akan sulit bagi Presiden Jokowi untuk bersikap netral.

Sebagai orang tua Gibran, Presiden Jokowi pastinya ingin anaknya bisa memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, Presiden Jokowi bisa mempercayakan kepada Gibran untuk melanjutkan peninggalannya jika terpilih di 2024.

“Situasi ini akan pelik ketika anak Presiden maju ikut kontestasi, rasanya akan tetap sulit bagi Presiden bertindak netral,” ujar Surokim.

Surokim menambahkan, Presiden Jokowi juga memiliki instrumen yang cukup kuat untuk bisa digerakkan. Instrumen tersebut pastinya digunakan untuk kepentingan pasangan Prabowo-Gibran.

“Apalagi Presiden juga punya tangan-tangan kekuasaan yang bisa bergerak tanpa komando sekalipun,” kata Surokim.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, memiliki pandangan yang sama dengan Surokim. Yusak menilai, Presiden Jokowi tidak akan bersikap netral. Alasannya, tidak lain karena Gibran ikut kontestasi.

“Sulit bagi Jokowi untuk netral. Dengan posisi Gibran

sebagai cawapres, tidak mungkin Jokowi tidak mendukung,” kata Yusak.

Menurut Yusak, jika ada pandangan Presiden Jokowi akan bersikap netral, itu hanya omong kosong belaka. Dia mengatakan, hal itu hanya untuk menetralkan suasana politik yang sudah mulai memanass.

“Jadi netralitas Jokowi saya kira basa-basi saja untuk menetralsir suasana politik yang sudah mulai memanass,” ujar Yusak.

Ketidaknetralan itu, lanjut Yusak, akan merugikan capres lainnya seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, bagi Anies hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Sebab, pasangan AMIN atau Koalisi Perubahan sejak awal tidak mengharapkan dukungan dari Presiden Jokowi.

“Semangat dari Koalisi Perubahan adalah bagaimana menghadirkan kepemimpinan baru yang berbeda dengan rezim saat ini,” kata Yusak.

Di sisi lain, ketidaknetralan itu akan sangat berpengaruh terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pastinya akan kehilangan efek elektoral Jokowi.

Yusak mengatakan, bagaimanapun Jokowi memiliki magnet elektoral yang turut mendongkrak suara PDIP dalam dua kali pemilu. Jika Presiden Jokowi mendukung penuh pencapresan Prabowo dan Gibran, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan sangat merugi. Sebab, Ganjar dan Mahfud secara tidak langsung akan melawan kekuatan dari kekuasaan.

“Jika Jokowi tidak netral alias mendukung Prabowo-Gibran, tentu poros

Ganjar yang paling dirugikan.

Tantangan TPN untuk memenangkan Ganjar tentu akan lebih kompleks,” tandas Yusak. ●RDO



“Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru”

*Todung Mulya Lubis*



# TIM GANJAR-MAHFUD RAGUKAN NETRALITAS PRESIDEN

**Presiden Joko Widodo diminta untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024 oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Apalagi, mengingat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, bakal maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.**

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, meminta ketegasan Presiden Jokowi untuk memerintahkan seluruh aparat pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.

“Diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan seluruh aparat pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024,” ungkap Todung, Jumat, 3 Oktober 2023.

Todung juga meminta Jokowi memastikan dirin-

ya netral lebih dulu sebelum memerintahkan ke pejabat hingga aparat pemerintah lainnya untuk tak memihak ke salah satu pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Arahannya tentang netralitas, kata Todung, tak bisa hanya pernyataan di mulut, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan nyata.

Todung lantas menyinggung adanya fenomena double talk, yaitu menghaluskan makna dari fakta yang ada. Todung melihat saat ini banyak pihak yang berbicara netral, tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal tidak netral. Dengan fenomena itu, dia memandang demokrasi dan bangsa saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja.

“Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru,” kata Todung.

Todung juga mencontohkan peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud MD dan atribut PDIP di Bali beberapa waktu lalu, yang menurutnya jelas tidak menunjukkan pemerintah bersikap netral.

Lebih jauh, Todung menilai dua UU yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu, di samping UU Pemilu. Menurutnya, aturan-aturan tersebut mengatur tegas sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral, dari ringan, sedang, berat hingga pidana.

“Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparat sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral,” ucap Todung.

Aturan-aturan tersebut juga akan melandasi Todung dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud MD melaporkan bila ASN yang tak tidak netral. “Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini,” tutur Todung.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, masih yakin Presiden Jokowi tetap netral di Pemilu 2024, meskipun baru-baru ini ada isu pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan kerja.

“Yang penting kan buat kita gini, kami jalan terus, kami ingin memastikan, yang pasti adalah bahwa kita ingin menjaga netralitas, sudah

itu saja. Masa enggak percaya (pemerintah jaga netralitas). Percaya lah, percaya dong,” kata Arsjad.

Arsjad pun tak ambil pusing soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Ia mengatakan, semua pihak punya hak politik masing-masing di Pilpres 2024.

“Pokoknya kita gini, apa pun yang ada, yang pasti kami melihat yang paling penting adalah bahwa ini kan suatu pesta demokrasi, semuanya mempunyai hak, itu aja,” ucap Arsjad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyebut pencopotan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud MD serta atribut PDIP untuk menjaga estetika kawasan saat kunjungan Presiden. Ia berkilah, yang terjadi hanya menggeser baliho dan bendera itu dan setelah kunjungan Presiden sudah dipasang kembali.

Terlepas dari itu, kekhawatiran pada netralitas Presiden dan aparaturnya tak bisa begitu saja lenyap dari benak sebagian publik. Apalagi jika melihat rentetan peristiwa sebelumnya.

Pengamat politik Ahmad Khoiril Umam melihat, indikasi penggunaan instrumen politik dan hukum untuk mencapai kekuasaan sudah tampak melalui wacana penundaan pemilu, narasi tiga periode presiden, dan yang terakhir putusan Mahkamah Konstitusi yang melapangkan jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Indikasi-indikasi orkestrasi kekuasaan dengan instrumen politik tidak mudah dibuktikan di atas meja. Tetapi, sinyal-sinyal itu makin kuat terasa,” ujarnya.

Dengan rentetan wacana serta peristiwa tersebut, Ahmad mengatakan, wajar jika publik kemudian khawatir presiden akan menggunakan kewenangan, aparaturnya hingga sumber daya negara, untuk memenangkan anaknya yang berpasangan dengan bakal capres

Prabowo Subianto di pilpres.

Apalagi dia melihat, majunya Gibran menjadi pertarungan besar bagi Jokowi dan keluarganya. Dengan demikian, terbuka potensi penyalahgunaan wewenang karena berbagai cara akan digunakan oleh Jokowi untuk mempertahankan dirinya dan keluarga.

“Potensi penyalahgunaan wewenang itu mulai dari penguatan pengaruh, dan mobilisasi kekuatan. Menggunakan instrumen negara untuk kepentingan partai politik, itu yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Untuk menutup potensi itu, mau tidak mau, netralitas harus betul-betul dijaga. Jika tidak, yang akan terjadi kemudian adalah manipulated democracy atau demokrasi yang dimanipulasi.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali adalah hal yang tepat.

“Untuk menjaga netralitas sesuai perintah presiden untuk semuanya netral. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif dilakukan,” kata Ujang.

Langkah tersebut juga dinilai tepat agar menghindari berbagai tuduhan yang dapat dialamatkan kepada Jokowi. Hal itu mengingat Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh aparat negara untuk bersikap netral.

“Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang spekulatif terhadap presiden yang dianggap nanti mendukung pihak tertentu, berat sebelah dan lain sebagainya,” ucap Ujang.

Dia menyebut, langkah tersebut sebenarnya sesuai dengan keinginan masyarakat agar aparat negara bersikap netral termasuk presiden. Dengan begitu, kompetisi Pilpres 2024 dapat berjalan dengan adil.

“Kunker Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang bagus, positif-positif saja. Itu yang memang diinginkan publik kan?” ungkap Ujang.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menggelar makan siang Bersama tiga capres guna menunjukkan bahwa dirinya akan netral dalam Pilpres 2024. Namun, pengamat politik Ari Junaedi menilai acara makan siang Presiden Jokowi dengan tiga capres di Istana adalah gimmick politik. Tujuannya untuk mengesankan bahwa presiden netral di Pilpres 2024.

“Apakah kita percaya, makan siang bareng, kemudian, apakah ini hanya gimmick politik bahwa dia ini netral? Tidak lah ya, kita sudah lihat, semua supra infrastruktur digunakan Presiden Jokowi untuk memuluskan putranya menjadi cawapres,” kata Ari.

Bahkan, Ari mengusulkan Jokowi bukan hanya untuk cuti, namun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sebab, dia menilai, Jokowi sudah jelas tidak bisa memisahkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kepentingan pribadi. Menurutnya, kepentingan pribadi Jokowi lebih menonjol. RDO





“Hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh tim Anies Baswedan dan tim Ganjar Pranowo penyalahgunaan aparat negara dan anggaran untuk kepentingan kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran”

Fernando Emas

# DUET ANIES-MUHAIMIN WASPADA APARAT NEGARA

**Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo terkait pentingnya sikap netral saat Pemilu 2024.**

Anies menyampaikan hal itu dalam kesempatan santap siang bersama Presiden Jokowi di ruang makan Istana Merdeka Jakarta, Senin siang, 30 Oktober 2023.

“Mereka yang sayang (kepada Presiden) ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres-pemilu,” kata Anies.

Anies menyampaikan bahwa ada banyak masyarakat yang ia kunjungi di berbagai daerah merasa sayang dengan Presiden Jokowi. Anies mengapresiasi arahan Presiden tentang netralitas ASN kepada jajaran kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk unsur aparat TNI-Polri.

“Kami melihat itu pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan aman dan damai karena seluruh unsur penyelenggara negara menunjukkan sikap netral dan profesional,” ujarnya.

Menurut Anies, Jokowi telah merespons positif masukan tersebut dalam sesi santap siang yang berlangsung sekitar 1 jam.

Sedangkan, Muhaimin Iskandar menganggap Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilpres 2024 karena

mengundang tiga bakal capres makan siang di Istana Kepresidenan. “Saya melihat pertemuan Presiden dengan tiga kandidat itu adalah niat baik Presiden untuk betul-betul akan netral. Kan kita tahu bahwa selama ini belum pernah mengundang tiga capres secara bersamaan,” ujar Muhaimin di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Jumat, 3 November 2023.

Ia berharap, sikap Jokowi itu menjadi pegangan aparat negara untuk sama-sama menjaga agar tidak berpihak pada capres tertentu. Maka, Cak Imin meminta masyarakat turut serta melakukan pengawasan dilapangan.

“Lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting. Saya yakin, kalau ada pelanggaran dan langsung disampaikan ke publik, akan mendapatkan respons dari presiden secara positif,” ucap dia.

Meski pasangan berjudul Amin itu yakin dengan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024, keraguan tetap muncul pasca putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, mengatakan, Presiden Jokowi pastinya tidak akan bisa bersikap netral di Pilpres 2024. Dia memprediksi Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe.

Dia berpendapat, Presiden Jokowi sejak awal memang sudah terlihat memiliki keterkaitan dengan salah satu capres, yakni Prabowo Subianto. Dukung Jokowi

kepada Prabowo Subianto akan semakin kuat ketika KIM memilih Gibran

bran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Di sisi lain, banyak pendukung Prabowo Subianto juga mengklaim bahwa Presiden Jokowi akan memberikan dukungan. Ditambah lagi, Presiden Jokowi secara terbuka pernah mengatakan bahwa 2024 merupakan jatah Prabowo Subianto.

“Apalagi pihak Prabowo berulang kali mengklaim didukung oleh Jokowi,” kata Fernando kepada Info Indonesia, Minggu, 5 November 2023.

Dia juga menyakini Presiden Jokowi tidak akan memberikan dukungan kepada bakal capres lainnya seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Artinya, Presiden Jokowi tidak akan bisa netral di Pilpres 2024. Apalagi, Anies yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan itu telah dianggap sebagai antitesanya Presiden Jokowi.

“Anies Baswedan sejak awal dianggap sebagai antitesis Jokowi. Sehingga, sangat tidak mungkin mengharapkan dukungan dari Jokowi,” kata Fernando.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga akan menggunakan kekuataannya untuk bisa memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo perlu berhati-hati.

“Hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh tim Anies Baswedan dan tim Ganjar Pranowo penyalahgunaan aparat negara dan anggaran untuk kepentingan kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran,” terang Fernando.

Keberpihakan Presiden Jokowi ini, kata Fernando, akan sangat merugikan pencapresan Anies Baswedan. Sebab, Presiden Jokowi bisa menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mempengaruhi perolahan suara Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Penggunaan kekuatan kekuasaan itu juga telah ditunjukkan Presiden Jokowi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres.

Dia menambahkan, ketidaknetralan ini dikhawatirkan akan berdampak luas. “Apalagi kalau ketidaknetralan

Jokowi berdampak terhadap ketidaknetralan TNI, Polri, BIN dan ASN, maka akan sangat merugikan pasangan Anies-Muhaimin,” jelas Fernando.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan, netralitas Presiden Jokowi itu tergantung dari mantan Wali Kota Solo tersebut memposisikan dirinya. Jika Presiden Jokowi memposisikan diri sebagai Kepala Negara, mau tidak mau dia harus bersikap netral.

Sedangkan, jika Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai Kepala Pemerintahan, hampir pasti dan kemungkinan besar Presiden Jokowi akan ikut cawe-cawe kembali. Apalagi, cawe-cawe tersebut pernah ia sampaikan.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi memberikan dukungannya kepada Gibran merupakan hal sangat wajar. Sebab, Gibran merupakan anaknya. “Apalagi yang maju adalah anak kandungnya dan menurut saya itu adalah secara ruang politik itu sah-sah saja,” kata Arifki.

Keberpihakan Presiden Jokowi kepada pasangan Prabowo dan Gibran memang sudah sangat terlihat. Sebab, sebelum berpasangan dengan Gibran, Prabowo diisukan bakal berduet dengan Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, dan Airlangga Hartarto.

Ketika nama-nama tersebut mencuat ke ruang publik, Presiden Jokowi tidak memberikan respons apapun. Berbeda ketika Koalisi Indonesia Maju mengusung duet Prabowo dan Gibran.

Dia mengatakan, ketika Prabowo memiliki ketertarikan dengan Gibran dan telah mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi, para anggota Koalisi Indonesia Maju langsung melakukan bargaining politik.

“Ini narasi yang cukup menguntungkan opsi politik yang diambil oleh beberapa anggota Koalisi Indonesia Maju dalam memutuskan Gibran,” jelas Arifki.

Namun, Presiden Jokowi masih memiliki kemungkinan untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Kendati begitu, dukungan tersebut pastinya tidak akan diperlihatkan di ruang publik.

“Mungkin-mungkin saja. Memang dukung kepada Anies Baswedan itu mungkin saja tidak secara langsung, tapi (melalui) ruang-ruang yang diberikan Pak Jokowi,” kata Arifki.

Dukungan terhadap Anies Baswedan itu, terang Arifki, akan ditentukan dari hasil Pilpres putaran kedua. Jika Anies Baswedan masuk ke putaran kedua, kemungkinan besar Presiden Jokowi akan mendukung pasangan Amin. “Diputuskan di putaran kedua, apakah Anies menjadi yang pertama, maka Anies akan dibutuhkan,” kata Arifki.

Dia menambahkan, antara ketiga capres yang akan berkompetisi di kontestasi 2024, pada dasarnya akan saling membutuhkan. “Apapun pilihan-pilihan politik yang diambil saling membutuhkan,” tandas Arifki. ●RDO





# AWASI KAMPANYE NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

**Kolaborasi multipihak mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), peserta pemilu, platform media sosial, dan Civil Society Organization (CSO), menjadi satu keharusan dalam melakukan countering terhadap penyebaran kampanye bermuatan SARA, hoax, dan ujaran kebencian di Pemilu Serentak 2024.**

**A**nggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan, platform media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu juga harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi.

“Media sosial menjadi satu tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggara Pemilu maupun peserta menggunakan media sosial untuk mengampanyekan masing-masing agendanya pada Pemilu 2024. Media sosial menjadi instrumen yang dinilai paling efektif untuk mengkampanyekan agenda atau penyelebarluasan informasi,” kata Lolly, Minggu, 5 November 2023.

Lolly mengatakan, media sosial memfasilitasi masyarakat untuk berekspresi, berpartisipasi, bahkan memobilisasi diri untuk perubahan. Di Myanmar, misalnya, media sosial digunakan oleh para aktivis dan jurnalis untuk melawan represi rezim otoriter militer.

Media sosial yang menyambungkan warga dari seluruh dunia, memungkinkan gaung suatu narasi untuk didengar lebih luas dan terbangunnya suatu gerakan solidaritas.

“Tidak hanya itu, media sosial merupakan teknologi yang berperan dalam pembebasan di Timur Tengah, serta perluasan ruang publik di Cina dan Malaysia,” kata Lolly.

Sekalipun membuka ruang publik yang lebih luas, pada dasarnya hal tersebut ditujukan untuk menampung sebanyak mungkin informasi dan data para pengguna untuk tujuan komodifikasi.

“Media sosial

memanfaatkan big data pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari periklanan, yang tentunya mengancam keamanan data pribadi pengguna,” tutur Lolly.

Big data inilah yang disebut oleh ahli media, Mark Andrejevic, sebagai alat pengawasan terhadap warga negara, konsumen, sekaligus pekerja. Ahli media, Vincent Mosco, bahkan menyebut big data yang dikumpulkan oleh media sosial dan dibeli oleh negara sebagai kombinasi dari kapitalisme pengawasan dan negara pengawasan.

Penggunaan media sosial telah menjadi pasar politik yang luas dan efektif dalam mendukung kemenangan kandidat maupun partai pada pemilu.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 menyebut penetrasi internet mencapai 215,6 juta atau 78,19 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Mayoritas pengguna internet aktif mengakses media sosial Youtube (65,41 persen), Facebook (60,24 persen), Instagram (30,51 persen) dan Tiktok (26,80 persen),” papar Lolly.

Selain itu, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media chat, yakni 98,63 persen menggunakan Whatsapp, 46 persen pengguna Facebook Messenger, 12,91 persen pengguna Telegram, dan 10,72 persen aktif menggunakan direct mas-

sage di Instagram.

Lolly menerangkan, beberapa pola penyebaran kampanye SARA, hoax, dan ujaran kebencian yang ditransmisi melalui media sosial terjadi pada Pemilu 2019.

“Pertama, serangan yang ditujukan pada kandidat, partai atau kubu (tokoh pendukung) yang bertarung dalam pilpres. Saling serang antar kubu dilakukan baik yang mengandung unsur SARA, hoax, maupun ujaran kebencian. Selain itu, terjadi juga pola penyebaran hoax yang menasar pada pemerintah dan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu,” kata Lolly.

Peta Kerawanan 2024 Kerawanan Pemilu 2024 dalam aspek kampanye di media sosial diukur berdasarkan tiga indikator utama. Pertama, adanya materi kampanye bermuatan SARA di media sosial akun lokal, termasuk grup WhatsApp atau Facebook.

Kedua, adanya materi kampanye hoax di media sosial akun lokal, termasuk grup WhatsApp atau Facebook.

Ketiga, adanya materi kampanye ujaran kebencian media sosial akun lokal.

Secara keseluruhan kerawanan pada kampanye media sosial terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara Umum, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki

tingkat kerawanan paling tinggi berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial, baik adanya kampanye bermuatan sara, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

“DKI Jakarta nilainya 75,00, Maluku Utara 36,11, Bangka Belitung 34,03 dan Jawa Barat 11,11,” jelas Lolly.

Pada tingkat kabupaten/kota, secara umum Kabupaten Fakfak dan Intan Jaya adalah kabupaten yang paling rawan yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial, baik adanya kampanye bermuatan sara, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

“Kabupaten Fakfak 30,46, Intan Jaya 19,35, Kabupaten Malaka 13,12, Kota Jakarta Timur 12,15,” kata Lolly.

Lolly menyampaikan, membangun kolaborasi multipihak potensi polarisasi masyarakat sangat rentan terjadi akibat adanya kampanye SARA, hoaks, dan ujaran kebencian yang ditransmisikan melalui media sosial.

“Aktor penyebaran kampanye SARA, hoaks, dan ujaran kebencian sangat sulit ditindak secara hukum mengingat karena sulit membuktikan afiliasi terhadap partai politik atau kandidat tertentu,” ucap Lolly.

Oleh karena itu, lanjut Lolly, salah satu cara yang paling efektif dalam memerangi kampanye SARA, hoaks, dan ujaran kebencian adalah dengan countering. Pertama, kolaborasi dengan banyak pihak untuk membentuk shield community atau satgas yang terdiri dari Kemenkominfo, platform media sosial, penyelenggara Pemilu dan komunitas masyarakat yang bertujuan melawan penggunaan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

Kedua, kolaborasi banyak pihak untuk membentuk bank data atau pusat informasi yang berisi informasi terpercaya atau Informasi valid yang digunakan untuk melawan penggunaan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

Ketiga, kolaborasi banyak pihak untuk melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat secara masif dan intensif dengan bersama-sama mengkampanyekan bahaya penggunaan SARA, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial terhadap keutuhan NKRI.

Keempat, patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio berkembangnya polih-sasi SARA, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. ●RDO





“Jadi para pihak yang kemudian menyoal sengketa pencalonannya bisa mendaftarkan atau bisa melakukan gugatan pencalonan tanggal 6,7, dan 8 November 2023”

*Mochammad Afifuddin*

INFO  
KPU

7

Minggu 1 • November 2023

# PERTARUNGAN 9.917 CALEG BEREBUT 84 DAPIL

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 9.917 orang masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPR Pemilu 2024 yang diusung oleh 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan. KPU juga menetapkan 668 orang masuk DCT anggota DPD yang terdiri atas 535 laki-laki dan 133 perempuan serta tersebut di 38 dapil.**

Hasyim menjelaskan, jumlah calon yang masuk DCT berkurang dua orang dari awalnya 9.919 yang masuk daftar calon sementara (DCS). Satu orang dibatalkan pencalonannya oleh Partai Gelora. Satu orang lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena terdaftar ganda.

“Yang bersangkutan ini di tingkat pusat (DPR RI) dicalonkan oleh Partai Perindo dan kemudian ternyata dia juga dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk DPRD provinsi Kalimantan Barat, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Jumat, 3 November 2023.

Dalam data yang dipaparkan Hasyim, tampak jumlah calon yang diusung 11 partai politik masing-masing adalah 580 atau jumlah maksimal. Tujuh partai lainnya jumlah calonnya tak mencapai 580.

PKB terdapat 580 calon anggota legislatif (caleg) DPR yang terdiri atas 376 laki-laki dan 204 perempuan. Persentase calon perempuannya secara keseluruhan adalah 35,17 persen. Partai Gerindra terdapat 580 caleg DPR yang terdiri atas 370 laki-laki dan 210 perempuan (36,21 persen).

PDIP terdapat 580 caleg DPR yang terdiri atas 388 laki-laki dan 192 perempuan (33,10 persen). Partai Golkar terdapat 580 caleg DPR yang terdiri atas 383 laki-laki dan 197 perempuan (33,97 persen). Partai Nasdem terdapat 580 caleg DPR yang terdiri atas 380 laki-laki dan 200 perempuan (34,48 persen).

Lalu, Partai Buruh dengan 580 caleg DPR yang terdiri atas 370 laki-laki dan 210 perempuan (36,21 persen). Partai Gelora dengan 396 caleg DPR yang terdiri atas 253 laki-laki dan 143 perempuan (36,11 persen). PKS mencalonkan 580 caleg DPR yang terdiri atas 357 laki-laki dan 213 perempuan (36,72 persen).

PKN mencalonkan 525 caleg DPR yang terdiri atas 327

laki-laki dan 198 perempuan (37,71 persen). Partai Hanura dengan 485 caleg DPR yang terdiri atas 298 laki-laki dan 187 perempuan (38,56 persen). Partai Garuda dengan 570 caleg DPR yang terdiri atas 334 laki-laki dan 236 perempuan (41,40 persen).

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 580 caleg DPR yang terdiri atas 364 laki-laki dan 216 perempuan (37,24 persen). PBB dengan 470 caleg DPR yang terdiri atas 277 laki-laki dan 193 perempuan (41,06 persen). Partai Demokrat dengan 580 caleg DPR yang terdiri atas 378 laki-laki dan 202 perempuan (34,83 persen).

PSI dengan 580 caleg DPR yang terdiri atas 355 laki-laki dan 225 perempuan (38,79 persen). Perindo mencalonkan 579 caleg yang terdiri atas 348 laki-laki dan 231 perempuan (39,90 persen). PPP dengan 580 caleg DPR yang terdiri atas 366 laki-laki dan 214 perempuan (36,90 persen). Terakhir, Partai Ummat dengan 512 caleg DPR yang terdiri atas 307 laki-laki dan 205 perempuan (40,04 persen).

KPU mengklaim jumlah calon perempuan per partai di setiap dapil sudah melebihi 30 persen. Adapun UU Pemilu dan PKPU mengharuskan caleg perempuan minimal 30 persen per dapil, bukan secara nasional. Hal ini menjadi sorotan karena hampir semua partai politik tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan di setiap dapil pada tahap daftar calon sementara (DCS).

Tidak tercapainya kuota 30 persen pada

tahap DCS terjadi karena KPU menerapkan pendekatan pembulatan ke bawah. Sebagai contoh, partai politik mengusung 8 caleg di suatu dapil, apabila dihitung murni, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4 orang.

Lantaran angka di belakang koma tak mencapai 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Dengan demikian, partai politik cukup mengusung 2 caleg perempuan saja dari total 8 caleg. Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen, bukan 30 persen.

Belakangan, Mahkamah Agung (MA) menganulir pasal yang mengatur pembulatan ke bawah itu. MA menyatakan, cara penghitungan yang sesuai UU Pemilu adalah menggunakan pendekatan pembulatan ke atas berapa pun angka di belakang koma. KPU diketahui menindaklanjuti putusan tersebut dengan meminta partai politik memedomani putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.

Ketika ditanya apakah DCT Anggota DPR setiap partai politik di semua dapil sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan sesuai putusan MA, Hasyim tak menjawab. Dia hanya menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam DCT setiap partai politik secara keseluruhan sudah melebihi 30 persen.

“Sepanjang yang kami ketahui ya, untuk caleg perempuan DPR RI dari semua partai politik, 18 partai politik itu keterwakilannya untuk di semua dapil di seluruh Indonesia sudah di atas 30 persen,” kata Hasyim.

Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, mengingatkan, partai politik ataupun calon yang gagal maju hanya bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu selama tiga hari kerja sejak penetapan DCT.

“Jadi para pihak yang kemudian menyoal sengketa pencalonannya bisa mendaftarkan atau bisa melakukan gugatan pencalonan tanggal 6,7, dan 8 No-

vember 2023,” kata Afif.

Afif menjelaskan, Bawaslu akan menyelesaikan gugatan tersebut dalam 12 hari kerja. Sebelum menyidangkan sengketa tersebut, Bawaslu terlebih dahulu akan memediasi gugatan penggugat dengan KPU.

Dia berharap DCT yang ditetapkan KPU sudah sesuai prosedur dan semua syarat calon. Dia pun menyampaikan tidak ada gugatan sengketa yang muncul ketika KPU menetapkan DCS Anggota DPR beberapa bulan lalu. Adapun sengketa terkait penetapan DCS Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota jumlahnya kecil, tak sampai satu persen dari total caleg.

## Logistik Pemilu

Hasyim menyatakan produksi logistik tahap pertama untuk Pemilu 2024 sudah mencapai di atas 50 persen. Produksi logistik tersebut dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama meliputi produksi kotak suara, tinta, dan segel.

Dalam hal distribusi, lebih dari 50 persen logistik pemilu sudah berada dalam perjalanan. Sebagian besar sudah diterima oleh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tahap kedua mencakup surat suara dan formulir. Hal ini masih menunggu hingga KPU melakukan konfirmasi kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan persetujuan desain surat suara dari masing-masing pimpinan partai politik tingkat daerah.

Produksi logistik pemilu tahap kedua dilakukan setelah penetapan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024 pada 13 November 2023.

“Nanti sekitar pertengahan November ini, tanggal 15 November sudah bisa mulai cetak surat suara,” kata Hasyim.

Menurut Hasyim, pencetakan surat suara menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan ketersediaan sarana pemungutan suara yang akan digunakan oleh pemilih pada hari pemungutan 14 Februari 2024.

Pada 5-7 November, KPU akan mengundang para perwakilan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota ke Jakarta setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pimpinan partai politik di tingkat daerah terkait desain surat suara Pemilu 2024.

Undangan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota tersebut dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi terkait persetujuan desain surat suara dari masing-masing pimpinan partai politik di tingkat daerah.

Selanjutnya, setelah berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024 pada 10 Februari 2024, KPU akan memulai proses persiapan logistik untuk pesta demokrasi tersebut • RDO



“Sampai saat ini, PDI-P masih fokus pada persiapan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden mendatang dan untuk memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2024”

Aswan Jaya



# KEMUNGKINAN BOBBY NASUTION DIUSUNG PDIP UNTUK PILGUB SUMUT

**Wali Kota Medan Bobby Nasution, dianggap sebagai salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).**

Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini mulai mempertimbangkan kemungkinan Bobby Nasution menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagub Sumut) pada Pilkada tahun 2024.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Sumatera Utara, Aswan Jaya, awalnya menekankan bahwa partainya hingga saat ini fokus pada agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Semua upaya dan sumber daya partai tersebut telah diarahkan untuk memenangkan kontestasi ini.

“Sampai saat ini, PDI-P masih fokus pada persiapan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden mendatang dan untuk memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2024. Baik secara nasional maupun di tingkat daerah,” jelasnya.

Namun, ketika saatnya tiba untuk membahas Pilkada Gubernur Sumatera Utara, PDI-P akan mempertimbangkan nama Bobby Nasution sebagai salah satu kandidat potensial. Selain Bobby, ada beberapa nama kepala daerah lain yang juga akan dipertimbangkan.

“Pak Bobby adalah salah satu kader terbaik PDI-P di Sumatera Utara. Ketika ada diskusi dan perbincangan di masa depan, tentu tidak hanya nama Pak Bobby yang akan dipertimbangkan, tetapi juga nama-nama seperti Pak Zahir (Bupati) Batu Bara, Pak Darma Wijaya (Bupati) Serdang Bedagai Sergai, dan nama-nama kepala daerah kader PDI-P lainnya,” bebernya.

Pertimbangan utama dalam pemilihan ini adalah untuk menentukan siapa yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan pemilihan tersebut dan siapa yang akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat Sumatera Utara di masa depan.

Aswan juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bobby

Nasution dalam memimpin Kota Medan, menganggapnya sebagai pemimpin yang kompeten.

Menurutnya, penilaian tersebut menjadi dasar objektif untuk mendukung Bobby Nasution kembali sebagai wali kota atau mendukungnya sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Sementara menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, ada kemungkinan besar bahwa Bobby akan menggandeng Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Sinurat, sebagai calon wakilnya.

Qodari berpendapat bahwa Sahat memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dukungan, terutama dari kalangan Kristen, yang bisa menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan.

“Alasan kuat Sahat cocok menjadi pendamping Bobby pada Pilkada Sumut yang akan datang karena berpotensi mendapatkan kontribusi suara yang dianggap cukup signifikan, terutama dukungan dari kalangan umat Kristen,” katanya.

Selain itu, GAMKI selalu mendukung Presiden Jokowi, yang merupakan modal besar untuk Bobby Nasution. Qodari meyakini bahwa Presiden Jokowi akan sangat menghargai dukungan dari GAMKI.

“Saya yakin Pak Jokowi berterima kasih luar biasa kepada GAMKI,” tambah Qodari.

Menurut Qodari, dukungan dari komunitas Kristen dan jaringan GAMKI akan menjadi faktor penentu dalam Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Ini bisa menjadi elemen yang sangat berpengaruh dalam perolehan suara.

Qodari juga menilai bahwa pasangan Bobby dan Sahat akan menjadi pasangan yang muda dan penuh energi, sehingga mereka

diyakini mampu memberikan yang terbaik bagi Sumatera Utara.

Dengan begitu, ia melihat bahwa pasangan ini memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan tersebut.

“Kalau saya terawang, saya bayangkan, saya kemarin keliling-keliling lapangan Benteng tadi pagi saya lihat poster-poster baliho kelihatannya di sebelah Bobby itu cocok kalau namanya Sahat,” jelas Qodari, merujuk pada potensi keserasian dan dukungan yang kuat dari Sahat Sinurat untuk Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, komposisi agama di Sumatra Utara terbagi menjadi beberapa kelompok. Agama Islam mendominasi dengan 62,8 persen, diikuti oleh Protestan dengan 26,9 persen, Katolik sebesar 7,4 persen, dan agama-agama lainnya kurang dari 5 persen, ter-

masuk Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Mengacu pada data BPS tersebut, Qodari berpendapat bahwa pasangan calon gubernur atau wakil gubernur harus memenangkan dukungan dari selain umat Kristiani jika ingin berhasil dalam Pilgub Sumut.

“Sumatra Utara adalah wilayah di mana saya yakin teman-teman dari GAMKI dan jaringan Kristiani akan sangat berperan dalam menentukan siapa yang akan mereka dukung pada Pilgub 2024. Ini akan menjadi faktor penentu,” ujarnya.

Qodari juga menilai bahwa Bobby dan Sahat, sebagai pasangan muda dan energik, akan mampu memberikan yang terbaik untuk Sumatra Utara.

“Jika saya bisa memproyeksikan, saya melihat poster-poster dan baliho-baliho di sekitar Bobby tampak cocok dengan sosok Sahat,” katanya.

Namun, Bobby Nasution telah membuat keputusan terkait partisipasinya dalam Pilgub Sumut yang akan datang pada tahun 2024. Bobby menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Kota Medan hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2024.

“Saya sampaikan dalam kesempatan ini, tahun 2024, saya memutuskan menyelesaikan pekerjaan di Kota Medan. Kita selesaikan dulu,” katanya.

Selain itu, suami dari Khayangan Ayu ini juga menegaskan bahwa saat ini ia belum mempertimbangkan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.

Ia masih ingin menyelesaikan tugasnya dalam pemerintahan Kota Medan.

“Kita selesaikan dulu tugas sebagai Wali Kota Medan.”

Dengan pernyataan tersebut, Bobby Nasution menegaskan prioritasnya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Kota Medan, dan keputusan apakah akan maju dalam Pilgub Sumut 2024 akan diambil setelah tugasnya sebagai Wali Kota selesai. ● IRY





“Kami memiliki dua kursi, artinya kami ingin mengembalikan kejayaan kami di DPR Papua, dan itulah alasan kami mendukung saudara Kenius Kogoya sebagai Calon Gubernur Papua periode 2024-2029”

*Yulianus Dwaa*

# INFO PILKADA

Minggu I • November 2023

9

## CALON PEMIMPIN MUDA SIAP KEMBALIKAN KEJAYAAN PAPUA

Selain mengusung Kamasan Jakobus Komboy alias Jack Komboy sebagai Calon Wali Kota Jayapura, Partai Hanura juga akan mendukung salah satu kader terbaiknya, Kenius Kogoya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Papua periode 2024-2029 pada Pilkada tahun 2024.

Keputusan ini diumumkan oleh Koordinator Wilayah VIII DPP Partai Hanura, Yulianus Dwaa, yang mewakili DPP Partai Hanura sebagai Korwil VIII Papua dan Papua Barat.

Yulianus Dwaa menyatakan bahwa Partai Hanura saat ini memiliki tiga kursi di DPR Papua, dengan 2 kursi dari daerah pemilihan Tabi Saereri dan 1 kursi dari daerah pemilihan yang kini telah menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Pegunungan Papua.

“Kami memiliki dua kursi di Provinsi Papua ini. Artinya kami ingin mengembalikan kejayaan kami di DPR Papua, dan itulah alasan kami mendukung saudara Kenius Kogoya sebagai Calon Gubernur Papua periode 2024-2029,” ujarnya.

Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh para calon legislatif dan kader Partai Hanura.

Yulianus Dwaa menjelaskan bahwa Partai Hanura selalu memberikan prioritas pada kader-kadernya dalam setiap momentum politik, seperti yang selalu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Dia menekankan bahwa situasi saat ini, dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg dijadwalkan pada Februari 2024 dan Pilkada pada September 2024, memberikan kesempatan yang tepat untuk mempersiapkan diri secara simultan.

“Dengan mengu-

mumkan figur Cagub dan Calon Wali Kota Jayapura, Partai Hanura ingin memberikan gambaran kepada publik tentang arah dan pemimpin yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024,” jelasnya.

Dia juga mencatat bahwa Partai Hanura sebelumnya telah mendukung kepala daerah di luar kader partai, yang pada akhirnya bergabung dengan partai lain setelah menang dalam Pilkada.

Oleh karena itu, Partai Hanura ingin mengusung kader-kadernya sendiri sebagai Calon Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memperkuat posisinya di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai Ketua DPD Partai Hanura Papua, Ketum KONI Papua, dan Ketua DPD Relawan Jokowi Provinsi Papua, Kenius Kogoya dianggap sebagai sosok yang memiliki visi yang kuat.

Kenius Kogoya telah berhasil mengubah Partai Hanura Papua menjadi partai yang modern dan mewakili kaum muda Papua dengan baik, persiapan yang sangat tepat untuk menyambut era baru Papua pada tahun 2024.

Prestasi penting lainnya yang dicapai oleh Kenius Kogoya adalah ke-

tika ia masih menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI Papua. Di bawah kepemimpinannya, penyelenggaraan PON XX Papua menjadi sukses dengan pencapaian prestasi yang mengagumkan dan penyelenggaraan yang lancar.

“Kenius Kogoya bukan hanya berhasil membawa Papua ke peringkat empat besar nasional dalam perolehan medali, tetapi juga berhasil mewujudkan berbagai pembangunan sarana olahraga di Papua yang memenuhi standar internasional,” tambahnya.

Ini adalah langkah penting dalam memajukan olahraga di wilayah ini dan memberikan kesempatan kepada atlet Papua untuk bersaing secara kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Sejarah akan selalu mengingat prestasi luar biasa Kenius Kogoya, seorang putra asli Papua, yang berhasil menjadi pemimpin lokal yang mampu mengorganisir dan menyelenggarakan sebuah acara olahraga nasional dengan begitu baik.

“Ia adalah contoh yang membanggakan bagi generasi Papua yang akan datang dan merupakan sosok yang inspiratif bagi semua orang yang peduli terhadap kemajuan Papua,” ulasnya. Pada tahun 2024, Papua akan memasuki era modern dan maju dalam berbagai bidang. Untuk meneruskan pembangunan Papua ke arah yang lebih baik, diperlukan seorang pemimpin muda yang memiliki semangat kerja keras, visi, dan kinerja terbukti.

erja terbukti.

Kenius Kogoya dinilai orang yang tepat menggantikan Lukas Enembe, karena seorang pemimpin muda yang telah teruji dan terlatih di bawah alam Papua dan telah sukses dalam memimpin berbagai event penting.

Kenius Kogoya adalah seorang pemimpin muda sejati yang tumbuh dari masyarakat Papua dan berjuang dari awal. Ia adalah sosok religius, rendah hati, cerdas, visioner, peduli, dan pekerja keras.

Selama memimpin DPD Hanura Provinsi Papua, ia telah banyak menyelenggarakan kegiatan sosial, seni budaya, dan berbagai perlombaan untuk kaum muda Papua.

Papua telah ditetapkan sebagai Provinsi Olahraga oleh Gubernur Provinsi Papua dengan persetujuan Kemenpora dan Presiden RI. Ini adalah program kerja yang sangat penting yang akan menghasilkan atlet berkelas nasional dan internasional dari Papua.

Kenius Kogoya bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini sebagai Ketua Umum KONI Papua, yang baru-baru ini terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Lukas Enembe.

Kemampuan Kenius Kogoya dalam memimpin KONI Papua untuk memajukan olahraga dan pembinaan atlet di Papua.

Banyak tokoh masyarakat dan pengamat politik memprediksi bahwa Kenius Kogoya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua pada tahun 2024.

Ini adalah langkah yang tepat mengingat peran penting Papua sebagai Provinsi Olahraga, yang memerlukan pemimpin yang memahami olahraga dan memiliki kinerja terbukti dalam memajukan olahraga di tanah Papua.

Sementara, Kenius Kogoya yang diusulkan sebagai Cagub Papua, menyambut pengusulan ini sebagai perintah dari partai dan bersedia menjalankannya.

Dia mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah maju sebagai Calon Anggota DPR RI, tetapi jika partai menunjuknya sebagai Cagub, ia akan menjalankan tugas tersebut sebagai kader partai.

“Saya akan menjalankan tugas sebagai kader sesuai arahan partai,” ungkapnya. •IRY



“Saya kira PPP akan tetap mengawal dan setia kalau memang Mbak Khofifah berkenan untuk jadi calon gubernur Jatim. PPP pasti akan menjadi garda terdepan”

Mujahid Ansori



# BANJIR RESTU UNTUK KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**Saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat dukungan dari PPP dan Hanura untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.**

Kedua partai ini sebelumnya telah menjadi pengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur 2018. Khofifah juga sudah mengantongi restu dari PKB, Gerindra, dan Demokrat mengungkapkan niat mereka untuk mendukung Khofifah.

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, Mujahid Ansori, menegaskan bahwa Khofifah bukanlah sosok yang asing bagi PPP.

Partai dengan lambang Ka'bah ini siap mendukung Khofifah jika dia memutuskan untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur 2024.

“Terkait pilgub, PPP sudah sepakat. Jadi mulai dulu PPP setia mengusung Mbak Khofifah. Saya kira PPP akan tetap mengawal dan setia kalau memang Mbak Khofifah berkenan untuk jadi calon gubernur Jatim. PPP pasti akan menjadi garda terdepan,” ungkapnya.

Menurut Mujahid, Khofifah merupakan representasi dari kader PPP. Sejak awal karier politiknya, Khofifah telah bersama-sama dengan PPP.

Bahkan ketika Khofifah tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, PPP selalu mendukung dan mengawalinya.

“Khofifah itu PPP, mulai dari awal kami mendukungnya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan hingga saat ini. PPP Jatim memiliki hubungan khusus dengan beliau, bahkan dalam beberapa Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang kami adakan, nama Khofifah selalu diperbincangkan,” jelasnya.

Mujahid, yang merupakan mantan anggota DPRD Jawa Timur, menambahkan bahwa PPP telah mempertimbangkan Khofifah maju sebagai calon gubernur.

“Terlebih lagi, jika Khofifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, PPP tidak akan ragu untuk tetap konsisten dalam mendukungnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Yunianto Wahyudi, menyatakan bahwa partainya akan secara solid mendukung Khofifah jika beliau memutuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

“Hanura akan mengusung Khofifah Indar Parawansa jika beliau memutuskan untuk maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Timur pada tahun 2024,” kata

Yunianto.

Pria yang akrab disapa Cak Masteng ini menegaskan bahwa Hanura akan mendukung Khofifah, tidak peduli dengan siapa pun yang menjadi pasangannya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

“Apapun pasangannya, Hanura akan tetap mendukung Khofifah Indar Parawansa, selama beliau masih ingin melanjutkan periode kedua,” tandasnya.

Sementara, Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas berbagai calon yang diperkirakan akan mencalonkan diri untuk jabatan gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) di Jawa Timur.

Elektabilitas Khofifah yang masih berada di posisi teratas membuat ia menjadi pesaing kuat pada Pilgub Jatim 2024.

Direktur ARCI Baihaki Sirajt mengatakan elektabilitas

Khofifah sebagai calon gubernur Jatim masih tetap unggul dan signifikan dibandingkan pesaing lainnya.

Secara rinci, hasil survei ARCI terhadap calon gubernur Jatim 2024 menunjukkan elektabilitas Khofifah sebesar 35,6%, disusul Emil Dardak 19,4%, dan Achmad Fauzi 17,3%.

“Disusul Eri Cahyadi 5,7%, Sarmuji 5,3%, Anwar Sadad 4,4%, Gus Ipul 4,3%, Gus Halim 3,2%, dan Heru Tjahjono 2,7%,” jelas Baihaki.

Baihaki menyebut peluang Khofifah maju dan menang di Pilgub Jatim 2024 terbuka lebar. Menurut dia, elektabilitas Khofifah bisa semakin meningkat jika ia resmi menyatakan pencalonannya dalam pemilu.

“Setelah Khofifah hampir dipastikan tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2024, maka peluangnya ada pada pencalonan Gubernur Jawa Timur untuk periode keduanya,” kata Baihaki.

Baihaki kemudian menyinggung calon wakil gubernur yang potensial mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Berdasarkan angka elektabilitas survei, Emil Dardak dinilai sebagai sosok paling berpotensi mendampingi Khofifah.

“Emil Dardak merupakan calon wakil gubernur yang paling berpotensi mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim atau Khofifah-Emil tahap II. Elektabilitas Emil sebagai calon wakil gubernur Jatim berada di angka 35,2%, jauh mengungguli calon lainnya,” jelasnya.

Dijelaskannya jika Khofifah dan Emil kembali berpasangan, peluang untuk menang di Pilgub Jawa Timur 2024 sangat besar. Pasalnya, bisa dikatakan bahwa saat ini belum ada calon lain yang menjadi penantang berarti.

Ia kemudian membeberkan tingkat kepuasan warga Jatim terhadap kinerja Khofifah dan Emil selama hampir lima tahun kepemimpinannya.

“Sebanyak 82,1% responden survei dari Jawa Timur puas dengan kinerja Khofifah, dan 81,7% puas dengan kinerja Emil,” tutupnya.

Survei ARCI dilakukan pada 22 Oktober hingga 27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Hanya saja, Khofifah dengan tegas menyatakan bahwa ia belum membuat keputusan mengenai langkahnya ke depan. Menurut dia, keputusan tersebut sepenuhnya tergantung pada berbagai faktor, terutama apakah akan ada izin atau dukungan yang diperlukan.

“Saya juga salah satu ketua PBNU, sehingga langkah-langkah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light. Nah itu yang saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, tetapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja,” jelasnya.

Khofifah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan memerlukan komunikasi yang mendalam dengan organisasi tersebut. • IRY





“Namun akan sulit memenangkan kontestasi dengan keterbatasan waktu dalam meyakinkan masyarakat apalagi jika sebelumnya tidak ada jejak kuat di daerah tersebut”

**Fatkurohman**

# MENAKAR PELUANG AGUS FATONI BISA JADI GUBERNUR SUMSEL

**Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini belum berminat untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) atau menjadi kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pilkada 2024 mendatang.**

**A**gus Fatoni masih ingin fokus melaksanakan tugasnya sebagai penjabat hingga masa dinasnya berakhir ketika gubernur yang dipilih rakyat sudah ada.

“Saya di Sumsel ini hanya ditugaskan bekerja dan akan bekerja sampai selesai. Setelah selesai, saya akan kembali ke birokrasi,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni usai Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah Se-Sumsel Tahun 2023 di Aula Putri Kembang Dadar Kantor BPS-DMD Sumsel, Rabu (1/11/2023).

Pria yang akrab disapa Fatoni ini menyebut, penugasan itu akan diselesaikannya dengan baik. Apalagi, waktu kerjanya masih cukup panjang atau hingga adanya kepala daerah yang baru hasil Pilkada 2024 nanti.

“Penugasan itu harus selesai, saya pensiun masih lama, masih panjang. Jadi, apa yang ditugaskan pimpinan saat ini akan saya kerjakan,” kata pria asal Bahuga, Lampung ini.

Penegasan itu, kata Fatoni juga terkait dengan netralitas ASN yang harus dijaga ketika Pemilu digelar nanti. Dirinya meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel untuk menjaga netralitasnya. Tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu mau pun ikut dalam politik praktis.

“Untuk Pemilu 2024, seluruh ASN di Sumsel wajib netral. ASN bertugas di birokrasi pemerintahan, tidak boleh ikut dalam politik praktis,” tegas Fatoni.

Menurutnya, netralitas ASN akan terus disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Sumsel dan mereka diminta tidak berpihak kepada siapa pun.

Menurutnya, kondusivitas di Sumsel ketika pelaksanaan Pemilu akan terus dijaga. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh stake holder ikut berperan menciptakan kondisi damai Sumsel.

“Semua stake holder memiliki peran dalam rangka menciptakan kondisi damai. Pemerintah, termasuk TNI/Polri akan menjalankan fungsinya untuk melaksanakan hal tersebut dan menjaga tetap kondusif,” bebernya.

Selain dari pemerintah, Fa-

toni juga berharap peran dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lainnya sangat diharapkan untuk menjaga Pemilu 2024 berlangsung damai.

“Dengan berlangsungnya Pemilu secara damai dan terjaganya kondusivitas, maka kenyamanan akan tercipta dan semuanya bisa menjalankan tugas dan aktivitas dengan baik,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan kondusifnya situasi di Sumsel, maka akan banyak dampak positif yang akan diterima. Terlebih, nama baik Sumsel hingga saat ini masih terjaga dengan baik.

“Jika Pemilu berjalan damai, investor akan datang ke Sumsel,” tukasnya.

Sementara Koordinator Wilayah Sumsel Public Intitute (Putin), Fatkurohman mengungkapkan penjabat Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota tetap punya peluang untuk maju di Pilkada 2024. Termasuk Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.

“Sepahaman kita sejauh ini belum ada ketentuan yang mengikat bahwa penjabat tidak boleh maju Pilkada,”katanya.

Menurut analisa dirinya, peluang Pj maju Pilkada itu menarik jika mereka yang menjadi Pj kepala daerah memegang amanah jabatannya lebih dari 1 tahun.

“Mengapa menarik karena punya peluang untuk mengeksplorasi kemampuan dan pikirannya untuk membangun daerah sehingga jejaknya bisa dinilai apakah

layak untuk memimpin kembali atau tidak. Jika layak maka peluang Pj untuk maju pilkada sangat terbuka,”bebernya.

Namun jika jabatan Pj, tidak lebih dari satu tahun, dipikir sulit akan mengeksplorasi kemampuan dalam membangun daerah.

“Walaupun dari sisi politik itu hak dan ada peluang jika mundur jadi Pj namun akan sulit memenangkan kontestasi dengan keterbatasan waktu dalam meyakinkan masyarakat apalagi jika sebelumnya tidak ada jejak

kuat di daerah tersebut,”ulasnya.

Dia menambahkan dari sisi aturan tidak ada larangan Pj mundur dari jabatannya sehingga siapapun Pj jika memiliki peluang untuk maju seperti dukungan politik dari parpol maka yang bersangkutan bisa maju.

Fatkurohman menyebut hingga saat ini belum terdengar ada Partai Politik (parpol) yang melirik Agus Fatoni, baik dari koalisi Ganjar-Mahfud MD, Prabowo-Gibran hingga Anies-Cak Imin.

“Mungkin masing-masing parpol masih konsentrasi pileg dan pilpres di daerah masing-masing,”sambungannya.

Terkait spekulasi jika Ganjar-Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024, maka Agus Fatoni bisa menjadi Gubernur Sumsel, Fatkurohman tidak ingin menerka-nerka mengingat belum terdengar adanya Parpol yang melirik Agus Fatoni sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024.

“Karena belum terdengar adanya Parpol yang melirik Agus Fatoni,”katanya.

Salah satu tugas Pj Gubernur Sumsel yang dilantik Oktober lalu ini yakni bagaimana mengatasi Karhutla secepat mungkin.

“Faktanya asap hingga saat ini masih menyelimuti Sumsel, tentu ini kritik dan Pekerjaan berat buat beliau,” katanya.

Dirinya berharap Pj Gubernur bisa mengatasi Karhutla secara jangka pendek dan jangka panjang. Artinya dia punya peluang untuk menyiapkan kebijakan jangka pendek dan pikiran jangka panjang untuk mengatasi karhutla, inilah yang dinantikan.

“Kita berharap Pj Gubernur bisa mengatasi Karhutla secara jangka pendek dan jangka panjang,” pungkasnya.

• IRY



“Sebagai Caleg yang lahir dari Aktivis 98, tentunya perjuangan pembelaan kerakyatan adalah jiwa dan semangat. Sehingga, tidak ada alasan untuk berhenti membela dan memperjuangkan hak rakyat, khususnya kaum tertindas dan miskin”

Andreas Okdi Priantoro



# RELA LEPAS JABATAN DEMI KURSI DEWAN

**Pada Pemilu 2024 ini ada ribuan masyarakat Sumatera Selatan yang berlomba dan berkompetisi untuk mendapatkan kursi legislatif. Persaingan untuk mendapatkan kursi tentu bukan hal yang mudah bukan pula hal yang mustahil untuk didapatkan.**

Sehingga meski peluangnya sangat kecil namun mereka tetap berkompetisi baik dengan rekan sesama partai maupun lain Parpol dengan harapan akan menjadi pemenang dan duduk sebagai anggota dewan selama lima tahun.

Hal ini juga dilakukan para pendatang baru di Pemilu 2024 yang mencoba peruntungannya di pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Salah satunya dilakukan Andreas Okdi Priantoro.

Mungkin banyak yang belum tahu sosok Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palembang dari PDI Perjuangan daerah pemilihan (Dapil) III (Iir Timur I, Iir Timur II dan Iir Timur III) yang satu ini.

Andreas Okdi Priantoro akan menjadi Caleg pendatang baru yang ikut bersaing dalam pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 mendatang.

Dirinya akan menantang nama-nama besar dan sudah dikenal lebih dulu oleh masyarakat dengan berbagai program yang ditawarkan. Termasuk para Anggota DPRD Kota Palembang yang saat ini kembali maju. Para incumbent itu tentunya tidak ingin kalah dengan para Caleg pendatang baru.

Bukannya minder, hal itu justru membuat Andreas OP makin termotivasi. Tidak ada hal yang tidak mungkin karena setiap kesempatan tetap ada peluangnya.

“Soal incumbent dan nama besar dalam Pileg nanti, itu akan jadi motivasi dan trigger untuk lebih kuat dalam berjuang. Hal itu bukan menjadi penghalang untuk berkonsentrasi pada 14 Februari 2024 nanti,” ujar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang ini.

Berangkat dari kalangan profesional dan

pebisnis, Andreas yang memiliki jabatan di PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC) sejak 2001 hingga saat ini mengungkapkan, pencalonannya ini berdasarkan keinginannya untuk hadir bagi kalangan buruh, pedagang, sopir angkutan, petani dan masyarakat lainnya.

Baik dalam pemenuhan hak-hak mereka, advokasi dan langkah-langkah hukum serta upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami.

Dimana selama ini suara-suara mereka kurang diperhatikan namun selalu dibutuhkan saat pencalonan saja.

“Sebagai Caleg yang lahir dari Aktivis 98, tentunya perjuangan pembelaan kerakyatan adalah jiwa dan semangat. Sehingga, tidak ada alasan untuk berhenti membela dan memperjuangkan hak rakyat, khususnya kaum tertindas dan miskin,” ungkap pria kelahiran Sukoharjo Jawa Tengah, 5 Oktober 1978 ini.

Meski dalam berbisnis Andreas terbilang sukses, Direktur Utama PT Sukses Media Digital ini mengaku, jika terpilih menjadi anggota dewan dirinya akan fokus pada tugas sebagai wakil rakyat.

“Saya akan melepaskan (jabatan di perusahaan) supaya bisa fokus. Alasan saya maju menjadi Caleg tentunya tidak lepas dari latar belakang Aktivis 98 yang terus digelorakan dalam jiwa dan tindakan nyata.

Bahwa perjuangan membela kaum tertindas tidak cukup hanya di jalan, tapi harus masuk ke sistem. Salah satunya dengan menjadi Anggota DPRD Kota Palembang dari PDI Perjuangan,” ungkap Wakil Direktur PS Palembang ini.

Ketua Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Sumsel ini menambahkan, agar dirinya bisa terpilih dalam pencalegan pertamanya, Andreas punya strategi khusus.

“Tentunya dengan turun ke lapangan menyapa dan bertemu konstituen. Serta rapat-rapat kecil menyampaikan pemahaman tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat serta fokus pada isu yang akan menjadi prioritas. Strategi lainnya rahasia,” bebernya.

Ketika dirinya terpilih, sesuai dengan latar belakang pencalonan dirinya, Andreas akan fokus di komisi yang membidangi urusan kerakyatan, kes-

ejahatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan sosial.

“Tapi soal itu tetap menjadi urusan partai sebagai penentu karena partai lebih paham soal penugasan dan kapasitas kader-kadernya,” kata Ketua DPW Federasi Buruh Indonesia Sumsel ini.

Selain memajukan diri sendiri dalam pencalegan dirinya, Andreas juga akan berupaya membuat pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD banyak mendapat suara dukungan dari warga Sumsel khususnya di Kota Palembang.

Ia menilai, pasangan Ganjar - Mahfud merupakan the dream team yang akan membuat Indonesia lebih maju. Keduanya dianggap multi talenta dan memiliki prestasi yang sudah teruji dan terukur dalam rentang 1999 hingga 2023 ini.

“Kedua orang ini mewakili wajah Indonesia, cakap secara keilmuan, memiliki rekam jejak kepemimpinan dan kematangan emosional yang dibutuhkan oleh bangsa untuk menyongsong kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Dirinya optimis, pasangan Ganjar - Mahfud MD akan menang di Sumsel saat Pilpres nanti. Apalagi, partai pendukung dan relawan akan terus menyosialisasikan visi misi pasangan itu hingga tingkat paling bawah.

“Kita semua akan bergerak dan kami optimis pasangan Ganjar - Mahfud MD akan mendominasi di Sumsel,” tukasnya.

Sementara rekan sejawat Andreas, Ujang Junaidi karyawan KFC mengatakan, Andreas merupakan sosok pemimpin bagi dirinya dan pegawai di KFC. Keputusan maju dalam Pileg pun sangat didukung banyak pihak.

Dia berharap Andreas bisa membawa manfaat bagi masyarakat kalangan bawah seperti mereka sehingga mereka juga merasa ada wakil di legislatif.

“Bisa dikatakan Pak Andreas memang layak menjadi anggota dewan, berkaca dari sikap dan cara memimpin rekan kerja di KFC. Budaya etos kerjanya juga sangat tinggi, beliau pun ramah dan rendah hati terhadap bawahan dan rekan kerjanya termasuk pula suka mentraktir,” ungkap Junaidi. •RDR





“Apalagi saya di Partai Hanura sekarang tentunya saya sangat mendukung lebih dari itu. Mudah-mudahanlah mereka akan berhasil memimpin Indonesia ke depan”

**Rohman Hasyim**

# KADER DAERAH EMBAN DUA MISI SEKALIGUS

**Pada Pemilu 2024 ini, para kader partai tentu sibuk menjalankan tugasnya baik sebagai calon legislatif dan mempromosikan pasangan calon presiden yang mereka usung. Dua tugas itu sama pentingnya karena menentukan masa depan mereka sendiri.**

Sehingga selain terus menjalankan sosialisasi pencalegan para kader juga menjalankan misinya untuk memenangi calon presiden dan cawapres yang mereka usung.

Hal inilah pula yang dilakukan Hardono Ciputra yang juga merupakan bacaleg DPRD Kabupaten Muara Enim. Bacaleg PKB Muara Enim ini cukup getol mempromosikan sosoknya serta melakukan sosialisasi terhadap pasangan Capres dan Cawapres yang mereka usung di Pilpres 2024 ini.

“Pasangan Anies dan Cak Imin adalah pasangan ideal menuju kemakmuran dan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia,” ujar Dono yang juga merupakan Kader PKB, Selasa (24/10/2023).

Selain berpengalaman lanjut Hardono, pasangan Anies-Cak Imin merupakan pemimpin muda yang nasionalis dan religius.

“Sehingga kemenangan AMIN adalah kemenangan bagi kaum muda milenial dan Gen Z,” ungkapnya.

Sebagai kader PKB, Dono mengaku bahwa dirinya sangat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan capres - cawapres tahun 2024 mendatang.

“Bismillah pasangan AMIN menang, memenangkan Anies Cak Imin menjadi keharusan bagi keluarga besar partai PKB, karena hal ini adalah kesempatan kita untuk terus berkontribusi demi perbaikan Indonesia ke depan,” jelasnya.

Selain itu, kata pria yang kini menginjak usia 31 tahun tersebut bahwa ia sangat yakin pasangan Anies Cak Imin sangat layak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sebagai kader PKB, dia juga terus bersemangat untuk membesarkan partainya dengan mengikuti Pileg 2024. Meski sempat gagal di 2019 namun tak mengurungkan niat Hardono Ciputra untuk maju pada Pileg DPRD Kabupaten Muara Enim.

Hal pertama yang membuatnya ingin

maju sebagai Caleg karena kurang lebih 20 tahun putra daerah dari Desa Sugihwaras Barat absen / tidak ada wakil di DPRD Muara Enim.

“Tidak ada putra daerah yang langsung mewakili, sehingga akses informasi dan perjuangan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan,” ujarnya.

Hal ini tentunya menjadikan silent hope atau harapan tersembunyi bagi masyarakat agar 2024 harus ada putra daerah yang mewakili aspirasi agar terdengar.

“Keprihatinan akan pemerataan pembangunan dan silent hope ini yang menjadi dasar untuk maju menjadi Caleg,” katanya.

Dono mengatakan ia akan menjadi wakil bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang membawa suara aspirasi masyarakat agar tersampaikan dan ditindaklanjuti pemerintah.

Tidak hanya itu, misi lainnya yakni juga memperjuangkan advokasi kepentingan masyarakat ke Pemkab Muara Enim. Kemudian membuka akses informasi sebagai program pemerintah ke masyarakat.

Untuk menggalang dukungan pada saat berkampanye, sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi Sumsel ini akan mengandalkan kekuatan silaturahmi. Melalui silaturahmi, selain memperpanjang umur juga memperluas rezeki sekaligus menambah ketakwaan.

“Dengan Silaturahmi tentunya akan memperpanjang umur, meluasnya rezeki dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT,” ungkapnya.

Apabila terpilih sebagai Caleg DPRD Kabupaten Muara Enim, Dono menjelaskan sebagai wakil rakyat ia akan berusaha bekerja sebaik mungkin agar pembangunan pemerintah harus merata sampai ke masyarakat di desa-desa.

## Dukungan Keluarga

Usaha yang sama juga dilakukan Bacaleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Hanura, Rohman Hasyim.

Selain melakukan sosialisasi calonannya sebagai Bacaleg tentu

dia juga ikut mempromosikan pasangan Pilpres pilihan partainya hingga ke desa-desa. Dimana Hanura mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini.

Dukungan ini juga berimbas pada peningkatan elektabilitas Partai Hanura di masyarakat khususnya di desa-desa.

Menurut pria kelahiran Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel, 5 Januari 1958 ini, dia bersyukur Partai Hanura mendukung Ganjar - Mahfud karena menjadi pasangan tepat untuk memimpin Indonesia ke depan..

“Keduanya mempunyai pengalaman yang luar biasa, pak Ganjar pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah dan pak Mahfud menjadi Menteri. Mereka, bisa saling mengisi dan bekerja sama, ini harapan kita untuk memimpin kedepan,” ujarnya.

Purnawirawan Polri mengaku meski ia bukan kader Partai Hanura namun dalam hati nuraninya tetap mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

“Apalagi saya di Partai Hanura sekarang tentunya saya sangat mendukung lebih dari itu. Mudah-mudahanlah mereka akan berhasil memimpin Indonesia ke depan,” katanya.

Pria

yang menekuni dunia advokat ini mengaku, yang membuatnya maju sebagai Bacaleg DPR RI karena ingin memberantas satu hal utama.

“Pengalaman terakhir saya sebagai anggota tipikor Polri dari 2007 hingga 2016. Saya akan tonjolkan permasalahan korupsi, maka dari itu kita akan beri didikan utama kepada anak-anak tentang bahayanya korupsi bagi bangsa,” jelasnya.

Apabila terpilih sebagai Caleg DPR RI, Rohman mengatakan ia akan mengusulkan agar sejak dini anak-anak dikenalkan tentang bahayanya korupsi.

“Kedua, masyarakat kita ini banyak sekali yang membutuhkan bantuan hukum karena ada yang tidak mampu. Maka dari itu, nanti akan kita perbanyak bantuan hukum secara gratis,” jelasnya.

Ia mengaku juga mendirikan LBH Bhakti Putra sejak 2016 sampai sekarang yang sering memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat.

“Untuk dana yah secukupnya sajalah. Kita hanya mengandalkan keluarga, pergaulan dan lainnya. Kemudian keluarga juga anak-anak sangat mendukung kerja kita selagi positif demi kebaikan bangsa,” tuturnya. ●RDR





# POLITIK DINASTI BANYAK TERJADI DI DAERAH, DAMPAK BURUKNYA SUNGGUH LUAR BIASA

**Masuknya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024 banyak mendapat kritikan dan sindiran karena dianggap melegalkan politik demokrasi. Sementara di daerah praktik seperti itu sudah banyak terjadi di daerah hanya saja ributnya jelang Pemilu 2024.**

**M**eski hingga kini tidak ada larangan terkait pelaksanaan politik dinasti ini namun dampak buruk yang ditimbulkan sangat besar. Selain membuktikan kalau demokrasi Indonesia tidak transparan juga menghidupkan kader-kader instan yang mendapat privilege orangtua atau orang berkuasa.

Sehingga pengkaderan yang dilakukan partai politik terkesan sia-sia sekaligus menunjukkan kalau praktek nepotisme di Indonesia masih sangat subur. Dinasti politik memunculkan kader-kader instan yang tidak mengikuti proses dari dan serta belum teruji secara mental dan politik.

“Hal itu kemudian menimbulkan kleptokrasi dengan masuknya mafia-mafia politik dengan mengutamakan kekerabatan dan akan membuat negara menuju kegagalan,” ungkap pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan.

Diungkapkan dosen FISIP Unsri ini, bukan hanya Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam kategori dinasti politik. Bahkan banyak sebelumnya juga melakukan hal yang sama terutama di lingkungan kepala daerah yang meneruskan kekuasaan orangtuanya.

Dampaknya timbul pemimpin yang tidak matang baik secara pengalaman maupun wawasan. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Dimana kekuasaan bisa diwariskan keturunan berikutnya tanpa melihat kualitas orang disekelilingnya.

“Namun tidak bisa juga dikatakan kemunduran demokrasi karena semuanya masih dalam proses. Nah kalau kita tarik dari Pilpres ini, tentu kita bisa melihat sendiri sebagai hal nyata dari keinginan seorang Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya melalui anaknya. Jadi dinasti politik jangan hanya dilihat dari apinya tapi juga karena ada asapnya,” terang mantan anggota KPU Sumsel ini.

Asap ini lanjut Ardiyan bisa saja terkait tingkat kepuasan

masyarakat kepada Jokowi yang sangat tinggi. Sehingga untuk melanjutkan tingkat kepuasan itu bisa saja didesain lewat dinasti politik yang dilakukan rezim penguasa sekarang.

Ardiyan meyakini, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka lewat desain politik yang panjang dan detail. Mulai dari isu tiga periode, masuknya keluarga Jokowi di Mahkamah Konstitusi kemudian dukungan partai-partai politik.

Jokowi juga cukup pandai menutupi desain tersebut. Bahkan untuk menunjukkan sikap netralnya dengan mengundang Bacapres makan siang bersama hingga dinamai politik meja makan. Di sisi lain Jokowi juga melakukan silent moving atau gerakan diam-diam.

“Jadi memang by design. Jadi sebenarnya dinasti politik itu yang dikhawatirkan adalah cara mendapatkannya karena tidak mengikuti aturan normal. Sementara ada orang-orang yang mencoba meluruskan aturan terkadang disingkirkan dengan cara apapun,” ungkapnya.

## Tidak Ada Istilah Dinasti Politik

Persoalan dinasti politik sendiri dalam pandangan penyelenggara Pemilu hanyalah sebuah fenomena politik di masyarakat. Sementara bagi lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mengenal istilah dinasti politik.

Sehingga saat Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan terhadap batasan usia di pemilihan presiden, semuanya sudah final dan mengikat.

“Keputusan MK ini kita melihat memantik legitimasi dan menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Namun bagi KPU melihat keputusan MK merupakan produk hukum yang

bersifat final dan mengikat,” terang Ketua KPUD Sumsel, Amrah Muslimin.

Ditegaskan Amrah, bagi KPU maupun lembaga penyelenggara Pemilu semuanya masuk dalam peserta pemilu tanpa melihat mereka melakukan dinasti politik atau tidak. Dimana dalam undang-undang Pemilu tidak ada yang mengatur atau melarang dinasti politik masuk di Pemilu dan Pilkada.

Diungkapkan Amrah Muslimin, dinamika dinamika politik sesungguhnya sudah banyak terjadi khususnya di Pilkada. Dimana sebagian besar keluarga kepala daerah ikut dalam peserta di Pilkada.

“Jadi sah-sah saja. Bisa di lihat di pemilihan legislatif, Pilkada, sebagian besar diikuti keluarga kepala daerah. Sebagian besar pejabat di daerah ikut serta kontestasi politik di Sumsel.

Di Pilpres 2024 sendiri, KPU daerah tidak terlalu dilibatkan namun mereka diminta untuk menyiapkan jadwal kampanye di daerah dengan berkoordinasi KPU RI. Kemudian akan mengatur zona kampanye setiap peserta Pilpres 2024.

“Zona kampanye ini penting untuk diatur. Kalau tidak tepat pengaturannya bisa dibayangkan dalam satu hari berlangsung di satu tempat

bagaimana situasinya.

Sehingga yang kita atur adalah

hari

dan tempat pelaksanaan,” ujar Amrah Muslimin.

Selain tidak mempermasalahkan dinasti politik, KPUD juga tidak bisa menindak banyaknya spanduk-spanduk bacaleg yang bertebaran di jalan, lorong, gang dan lainnya karena memang belum masuk masa kampanye.

Sehingga saat KPU dipertanyakan apakah itu melanggar, kami katakan tidak melanggar. Namun KPUD Sumsel juga menayangkan tindakan para Bacaleg yang menempelkan foto-foto mereka di sembarang tempat.

“Harapan kita kepada partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik itu bukan saja soal pemahaman tapi juga mengajarkan tingkah laku yang baik termasuk tidak memberikan contoh buruk ke masyarakat dengan membuat semrawut kota. Itu jelas melanggar Perda, dan sebaiknya dilakukan penurunan saja,” tegas Amrah.

KPU dan Bawaslu akan melakukan tindakan pelanggaran di atas tanggal 3 November atau setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) dan para bacaleg dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024. Sehingga siapapun yang melanggar akan dilakukan penindakan.

Diungkapkan Amrah Muslimin, di Pemilu 2024 ini ada perbedaan di pemilu sebelumnya. Dulu setelah DCS yang bisa diganti adalah mereka yang meninggal dunia dan setelah adanya putusan di pengadilan.

Sementara di Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), partai politik dapat mengganti calon dan mengubah posisi nomor urut dalam masa pencermatan. Dari beberapa Parpol di Sumsel, ada yang melakukan hal tersebut.

“Ada yang mengganti Caleg dan nomor urutnya. Itu diperbolehkan. Bahkan ada beberapa anggota DPRD yang memilih pindah partai politik,” jelasnya.

Sementara untuk bacaleg yang tersandung hukum dan berstatus tersangka, KPUD Sumsel tidak berhak mengganti atau mencoret. Sehingga mereka tetap berstatus bacaleg.

“Hingga saat ini mereka yang berstatus tersangka belum ada penggantian dari partainya masing-masing,” ucapnya.

•RDR





“Kalau kami tidak berisik takutnya tadi pemilih muda memilih paslon hanya karena umurnya lebih muda dari paslon lain. Biar anak-anak muda di Indonesia tidak salah pilih kami harus berisik”

*Mohd Azra D Dzaky*

# JANGAN KECILKAN SUARA ANAK MUDA, TOLONG DENGARKAN KAMI!

**Tiket untuk duduk di kursi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 nanti terbesar ada di suara pemilih muda yang berjumlah 52 persen. Bila anak muda dilibatkan di Pemilu dan Pilpres nanti mereka akan berisik hingga suara mereka didengarkan.**

Hanya saja tidak semua anak muda khususnya kalangan mahasiswa akan memilih calon anak muda juga. Mereka lebih rasional, mana yang dianggap bisa mewakili suara mereka maka dialah yang akan mereka pilih. Sehingga tidak ada jaminan kalau Gibran Rakabuming Raka akan meraup suara dari anak muda juga.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sriwijaya (Unsri) Mohd Azra D Dzaky mengatakan, belum tentu suara pemilih muda akan memilih calon termuda di Pilpres 2024 seperti Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Bahkan sebaliknya mereka akan terus bersuara agar telinga para calon presiden mendengar apa yang diinginkan anak muda khususnya dari kalangan mahasiswa. Inilah saatnya Generasi Z atau Gen Z seperti mereka menentukan arah politik bangsa dengan berpikir secara rasional.

Azra menegaskan peran Gen Z di Pilpres 2024 menjadi penentu besar untuk menunjuk siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Sebagai penentu pemilih muda tidak akan menggunakannya dengan sembarangan lagi.

“Kami (mahasiswa) di Pemilu 2024 ini akan berisik karena anak muda jadi penentu. Anak muda ingin apa, yah kami ingin gagasan kami dituruti. Kalau kami tidak berisik takutnya tadi pemilih muda memilih paslon hanya karena umurnya lebih muda dari paslon lain. Biar anak-anak muda di Indonesia tidak salah pilih kami harus berisik,” jelasnya.

Azra melihat di Pemilu 2024 ini suara anak muda seperti dikedirikan dan tidak dianggap. Padahal mereka itu akan nurut kalau suaranya didengarkan namun sebaliknya mereka juga akan berisik bila merasa dikesilkan. Apalagi suara Gen Z menjadi penentu utama di Pemilu 2024 ini.

Mahasiswa Unsri menyebutkan berisik disini sebagai bentuk suara yang akan digaungkan selama Pilpres 2024 khususnya di Sumsel. Mereka tidak mau pemilih muda dibodoh-bodohi seperti sebelumnya.

Sebagai kaum muda di Sumsel dia meminta semua pemilih muda untuk menentukan pilihan secara rasional. Diakuinya Gen Z harus

banyak pertimbangan saat berada di bilik pencoblosan menentukan pemimpin bangsa secara rasional penuh beragam pertimbangan.

“Memilih itu berdasarkan rasionalisasi! Ya, harus berintegritas, memiliki kompetensi, track record jelas punya kemampuan memimpin. Tidak memilih paslon hanya ada privilege dari bapaknya sehingga dia bisa menjadi pemimpin di negeri ini,” imbaunya.

## Punya Karakter Berbeda

Ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan bagi anak muda mulai dari ruang-ruang untuk bersuara. Ruang suara anak muda saat ini mulai minim bahkan dikesilkan. Dominasi politisi senior membuat demokrasi Indonesia terasa tidak mengasyikan bahkan ada upaya pembungkaman untuk anak muda.

“Seperti contoh ada salah satu Capres yang minta tayangannya dibatalkan setelah di roasting Kiki Syaputri. Bagaimana kami yang bukan siapa-siapa ingin menyuarakan untuk anak muda. Jadinya demokrasi yang tidak asyik,” ungkap Lucky Ramadhan selaku Kepala Departemen Eksternal BEM SI Kerakyatan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Kerakyatan menilai, Presiden Jokowi saat ini sedang

menjalankan Kabinet Indonesia Mundur. Hal ini ditandai dengan banyak masalah hak azasi manusia dan ada cawe cawe politik dari Pak De Jokowi.

“Kemunduran yang paling besar adalah kemunduran demokrasi Indonesia. Memang banyak dinasti politik saat ini mulai dari ada gubernur yang anaknya jadi bupati, ada kepala daerah yang anaknya anggota DPRD. Tapi yang paling mengerikan dari Jokowi adalah merubah regulasi melalui mahkamah konstitusi,” tambah Azra.

Dari pandangan BEM Unsri, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024 paling viral sering muncul. Lalu opini dan frame pemikiran pemilih muda mulai terbentuk cawapres Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang

dengan umur mudanya dinilai sangat mengerti kaum muda layak mewakili Gen Z dan harus dipilih oleh pemilih muda.

Dari penilaian Lucky Ramadhan dan Azra ketiga Capres punya karakteristik masing-masing.

Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) secara

umum mereka melihat cukup santun dan berwawasan dan menjadi pasangan paling sering kena serangan.

Kemudian ada drama sakit hati di pasangan ini saat Anies Baswedan akhirnya memilih Cak Imin daripada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun secara umum pasangan Amin adalah pasangan yang cocok dan saling menguatkan.

“Kalau dilihat cara berkampanye, mereka membawa politik ini ke arah santai dan santun. Pendekatannya yang lucu dan santai,” jelas Lucky.

Ganjar - Mahfud, pasangan yang dipengaruhi langsung PDIP. Masuknya Mahfud MD untuk menutupi sisi lemah Ganjar Pranowo yang terkesan sering melakukan blunder. Sehingga perlu sosok yang kuat dan itu ada pada diri Mahfud MD.

Sebagian besar pemilih rasional lebih condong melihat sosok Mahfud MD yang dianggap mampu dan kuat dibidang penegakan hukum dan berintegritas tinggi.

“Pasangan ini punya karakter yang kuat terutama pada sosok Mahfud MD. Bagi masyarakat Indonesia, sosok Mahfud seperti superhero di bidang hukum,” urai Lucky.

Prabowo - Gibran, perpaduan tokoh senior dan anak muda sekaligus berstatus sebagai kader PDIP. Pasangan ini paling banyak disorot karena dinilai jomplang dalam segi usia.

Pasangan ini masih terlihat abu-abu karena karakter yang timbul belum terlihat jelas. Sosok Gibran masih dipengaruhi Jokowi sementara Prabowo mulai ada sedikit perubahan.

“Sehingga kalau memang Gibran menunjukkan sisi anak muda, ayo tunjukkan gagasan untuk anak muda itu,” terang Azra.

Akademisi dan pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) Ade Indra Chaniago menyebutkan secara logika tidak ada jaminan bahwa calon muda akan dipilih oleh anak muda. Dia menilai semua ini hanya rentetan strategi untuk meraup suara anak muda yang dilakukan oleh salah satu paslon.

“Munculnya calon muda dalam konteks Pilpres akan diselenggarakan pada tanggal 14 februari 2024 adalah merupakan pilihan strategi yang berangkat dari bonus demografi berdampak pada meningkatnya jumlah pemilih muda dan pemilih pemula. Tentunya dengan harapan pilihan strategi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan approach terhadap pemilih milenial yang jumlahnya mencapai sekitar 60 persen,” kata dia.

Strategi politik capres Prabowo Subianto mempersunting Gibran Rakabuming Raka berumur muda di Pilpres 2024 demi melirik suara pemilih muda bisa saja tidak berjalan mulus. Pemilih muda di era digitalisasi memiliki kemampuan dan harapan lebih besar dari pemilih muda di era terdahulu.

“Efektif atau tidaknya strategi Prabowo menggandeng Gibran, itu akan sangat bergantung kepada apakah Gibran mampu menjawab hope pemilih milenial tersebut. Artinya kalau tidak mampu menjawab hope tersebut maka bisa dipastikan bahwa strategi yang dipilih dengan memunculkan calon muda tidak akan efektif,” jelasnya. ●RDR



“Semuanya memang baik tapi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan pilihan terbaik saat ini”

Anton Nurdin



# PARTAI KOALISI DI DAERAH SIAP BERAKSI

**Koalisi partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di daerah menunjukkan soliditasnya. Meski berbeda partai namun mereka punya satu misi yang sama yakni memenangkan pasangan Ganjar - Mahfud di daerah masing-masing.**

**S**alah satu partai koalisi yang ikut bergabung dengan PDIP untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah Partai Hanura. Tanpa keraguan sedikitpun, partai ini menyampaikan dukungannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud.

Keputusan itu ternyata tepat karena Partai Hanura merasakan dampak positifnya terutama dalam elektabilitas yang terus meningkat termasuk di Sumatera Selatan.

Diungkapkan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar, mereka mendukung penuh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apa yang diputuskan pimpinan Partai Hanura mereka akan setia dan patuh dalam satu garis komando.

“Artinya kami berada dalam satu nilai yang sama yakni mengedepankan moralitas dan harga diri kesamaan tadi. Intinya kesetiaan ukuran bagi kami,” tegas Azhar.

Sehingga dengan tegas dan bangga mereka menyatakan diri berkoalisi dengan partai PDIP dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Dimana Partai Hanura setelah satu jam PDIP mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon Presiden, Ketua Umum Partai Hanura langsung mengumumkan ikut bergabung.

“Bahkan Hanura menjadi partai pertama kali menyatakan mendukung Ganjar Pranowo setelah satu jam PDIP mengumumkan. Tidak ada keraguan dan tidak mendukung tanpa sebab namun melalui kajian yang cukup lama. Kami menginginkan Indonesia lebih maju, dan kami yakin sosok Ganjar Pranowo mampu membawa Indonesia yang lebih baik, berhasil mencapai tujuan seperti cita-cita masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi partai, Azhar menegaskan mereka akan mampu mendulang suara pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga meski harus bertarung dengan para petahana legislatif namun mereka tidak gentar menghadapi persaingan.

“Kader dan caleg dari Partai Hanura ini adalah petarung. Sehingga kami tidak gentar dengan apa yang dilakukan kawan-kawan dan sahabat Caleg dari partai lain. Untuk mengukur itu kita harus bergerak kalau tidak bergerak bagaimana bisa

tahu,” terangnya.

Selain mendukung kemenangan Ganjar - Mahfud juga tetap fokus di pemilihan legislatif. Dimana dalam satu tahun ini mereka fokus meningkatkan elektabilitas dan popularitas Partai Hanura agar membuat masyarakat tahu.

Di Pileg sendiri, Partai Hanura Sumsel menargetkan minimal 5 kursi di DPRD Sumsel serta di kabupaten/ kota. Capaian target itu tentu harus disertai kerja keras dari para kader dan mereka yakin Partai Hanura bisa melakukan hal tersebut.

## Capres Pilihan Terbaik

Semangat yang sama juga dirasakan kader PDIP sebagai pendukung utama pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Dimana para Capres saat ini adalah tokoh-tokoh terhebat bangsa namun dari tiga terbaik itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah yang paling baik.

Kader PDIP Kota Palembang, Anton Nurdin mengungkapkan, setelah dia melihat dan mempelajari, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan luar biasa. Ganjar dan Anies adalah satu geng yakni sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Sementara Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh penting di masa Orde Baru yang cukup mewarnai dunia militer saat ini.

“Semuanya memang baik tapi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan pilihan terbaik saat ini,” tegas Anton Nurdin.

Di sisi lain Anton Nurdin juga memuji ketokohan Megawati Soekarnoputri yang dinilai tidak haus kekuasaan dan lebih mengedepankan nilai kebangsaan.

“Kalau Megawati haus kekuasaan dia bisa saja menunjukan anaknya Puan Maharani sebagai Capres atau Cawapres tapi dia lebih memilih orang yang cerdas, dan hebat serta popularitasnya besar. Jadi kami sangat bangga dan salut

dengan ketua umum kami ini,” kata Anton Nurdin.

Sehingga keputusan Megawati memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah tepat. Dibandingkan pasangan lain, ini adalah pasangan terbaik yang ada saat ini.

Ketua KONI Kota Palembang ini membandingkan dengan pasangan lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang lebih kental lewat identitas politik. Meski secara wawasan dan pengalaman Anies Baswedan juga sangat baik namun ditakutkan malah menimbulkan perbedaan di masyarakat.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai terlalu jomplang. Dalam karir militernya

Prabowo cukup cemerlang termasuk juga dalam berstrategi hanya saja dia dikenal sebagai sosok yang emosional.

“Sementara Gibran adalah anak muda yang punya potensi besar hanya saja belum teruji dan kurang berpengalaman apalagi di dunia perpolitikan,” ucapnya.

Sebagai kader PDIP, Anton Nurdin tidak merasa mereka terlalu kehilangan sosok Gibran Rakabuming karena pilihan partai sudah tepat. Sehingga bila Gibran ingin menjadi Cawapres Prabowo itu adalah hak politik dia.

Sejauh ini PDIP juga tidak memberi sanksi atau melakukan pemecatan atas keputusan Gibran tersebut. Di sisi lain, Gibran juga tidak melepaskan statusnya sebagai kader PDIP yang telah membawanya sebagai Walikota Solo.

Di sisi lain mereka juga tidak terlalu bangga kalau memang Gibran memang jadi Cawapres karena Prabowo pasti mengutamakan gerbong dari Partai Gerindra.

“Bagi kami biasa saja itu, yang penting bagi kami adalah kita bekerja untuk kita. Itu pesan yang disampaikan ibu Mega kepada kami,” ujar mantan kader Partai Golkar dan Partai Demokrat tersebut.

Hal ini juga yang membuat Anton Nurdin mengaku bangga kepada partainya yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi manuver politik yang dilakukan Joko Widodo di Pemilu 2024 dengan memasukkan anaknya di Pilpres, Anton Nurdin menilai hal itu biasa saja. Dimana praktik dinasti politik sebetulnya telah banyak dilakukan selama ini.

Sehingga dia juga tidak yakin Presiden Jokowi akan berlaku netral di Pilpres 2024 ini karena bagaimanapun seorang bapak pasti tentu mendukung penuh anaknya.

•RDR





“Tidak ada hubungan itu bukan permasalahan kita di koalisi. Tentunya koalisi enggan untuk merespon yang bukan urusan kepentingan partai di dalam koalisi”

Armansyah

# KIM DAERAH ENGGAN RESPON KONFLIK KELUARGA JOKOWI - MEGAWATI

**Di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini, keluarga Joko Widodo secara terang-terangan menjadi lawan Megawati Soekarnoputri dengan membelotnya Gibran Rakabuming Raka dari PDIP menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Keputusan itu menunjukkan perlawanan Jokowi kepada Megawati yang mendukung penuh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 bersama partai koalisinya.**

Konflik panas dingin Megawati dan Jokowi mulai terus mencuat mulai dari video dengan narasi Megawati Soekarnoputri menepis tangan Presiden Joko Widodo di momen Rakernas IV partai awal Oktober lalu. Ada juga video pidato kesalnya Megawati terhadap sikap kader partai yang melakukan manuver main dua kaki.

Konflik Megawati dan Jokowi ini tentu memantik perseteruan para kader pendukung koalisi Pilpres 2024 baik itu Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi PDIP di berbagai daerah.

Keputusan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dinilai makin mempertajam konflik antara Jokowi dan PDIP setelah sebelumnya Kaesang Pangarep juga memilih bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahkan menjadi ketua umum.

Konflik ini secara tidak langsung cukup mempengaruhi kekuatan di Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka.

Namun partai-partai koalisi yang tergabung di kedua pasangan Capres dan Cawapres ini tidak mau terlalu dalam menangani konflik keluarga tersebut. Mereka hanya fokus pada kemenangan Pilpres dan pencalegan, soal perseteruan, itu bukan ranah mereka.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Selatan (Sumsel) Armansyah menyikapi panas dingin kondisi Jokowi dan Mega menilai hal itu bukan urusan koalisi dan partainya.

“Tidak ada hubungan itu bukan permasalahan kita di koalisi. Tentunya koalisi enggan untuk merespon yang bukan urusan kepentingan partai di dalam koalisi,” jelasnya.

Dia tetap menyebutkan Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia dan Megawati Megawati Soekarnoputri mantan Presiden Indonesia. Keduanya tetap dihormati dan memiliki porsinya sendiri-sendiri.

“Saya rasa Pak Jokowi juga tahu ruangnya sebagai Presiden dan tidak akan keluar dari sana tetap menjalankannya dengan baik dan bijaksana. Makanya kami tidak terlalu merespon karena keduanya tahu yang terbaik untuk Indonesia,” terang Armansyah yang partai ikut bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo - Gibran.

Selain persoalan panas dingin hubungan Jokowi dan Megawati terkait keputusan Gibran Rakabuming Raka, hal itu juga menjadi masalah pribadi bukan masalah koalisi.

“Kalau urusan ingin pindah partai misalnya itu pilihan pribadi mas Gibran. Tentunya bukan ada yang mempengaruhi semua orang politik tahu itu dan saling menghormati keputusan tersebut,” jelasnya.

Disisi lain, dia menjelaskan KIM di Sumsel terus menjalin ikatan harmonis dan intens berkomunikasi. Kendati memang masih terlihat sepi sepi saja karena KIM belum menggelar kegiatan khusus di daerah.

Armansyah mengatakan, di daerah memang belum ada gerakan karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

melakukan pendaftaran. Dimana KIM masih terfokus kepada

deklarasi di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta.

“Makanya KIM di daerah terkesan belum ada gerakan karena masih fokus di pusat. Tetapi secepatnya kita akan koordinasi untuk langkah kedepan,” ungkapnya.

Armansyah menyebutkan komunikasi kedepan akan dibentuk dengan melakukan pola anjarsana dalam balutan kunjungan silaturahmi semua KIM di Sumsel. Kondisi ini akan membahas program-program kampanye untuk kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Polanya seperti apa masih kita akan bicarakan di pertemuan perdana setelah deklarasi di Jakarta,” tuturnya.

Untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka biasanya di setiap daerah akan membuat tim khusus. Dari setiap tim khusus itulah akan menjalankan program kampanye sesuai arahan dari pusat.

“Tim belum dibentuk tetapi biasanya saat kampanye akan ada tim khususnya, tujuannya agar terfokus dibuat tim-tim khusus seperti itu,” terangnya.

Karena koalisi KIM mengusung Capres Prabowo dari Partai Gerindra semua program diberikan oleh partai tersebut sebagai ketua Tim. Jadi di daerah juga pastinya ketua tim juga akan ditunjuk dari Partai Gerindra.

“Kita sekarang menunggu koordinasi dari Partai Gerindra di Sumsel untuk langkah-langkah selanjutnya. Ketua tim adalah dari partai Gerindra pusat yang akan memberikan arahan kepada partainya di daerah,” pungkasnya

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumsel 2 DPD Partai

Golkar Sumsel Dr Hilmin menjelaskan, mereka tentu akan totalitas mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

“Dari sana kita tegak lurus menjalankan perintah untuk mensosialisasikan ini juga hingga ke Kabupaten Kota di Sumsel. Di Daerah kami juga sudah ada rancangan untuk melakukan berbagai rancangan gerakan tinggal tunggu petunjuk teknis saja,” ucapnya.

Diakuihnya untuk koordinasi dengan koalisi KIM terus terbangun dan dalam waktu dekat akan ada komunikasi lagi. Namun untuk pertemuan dalam waktu dekat masih belum ada pembahasan.

“Untuk pertemuan koalisi Prabowo dan Gibran di daerah ini memang belum ada tetapi saya yakin dalam waktu dekat akan terjadi,” jelas Hilmin.

Terkait isu politik antara Megawati dan Jokowi, Partai Golkar tidak mau ikut campur atau memberikan respon karena hal itu adalah dapur PDIP terlebih lagi bukan partai yang berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran.

“Lebih dalam kita tidak boleh ikut campur dan itu juga tidak mengganggu konsolidasi koalisi Prabowo dan Gibran,” tegas dia.

Apabila dihubungkan dengan maraknya isu dinasti politik juga dinilainya tidak akan berdampak kepada kekalahan Prabowo dan Gibran, hal itu hanya isu yang dibuat dan diciptakan untuk alasan tertentu saja.

Baginya dalam politik pemerintahan tidak ada istilah politik dinasti hanya berlaku di sebuah kerajaan saja.

“Politik dinasti interpretasi yang tidak objektif cenderung subjektif, karena ini bukan kerajaan raja yang memberikan tahta kepada anaknya. Tetapi Gibran mengikuti mekanisme yang ada nanti juga akan dipilih berdasarkan pilihan masyarakat secara demokrasi. Jadi apa yang disebut-sebut politik dinasti itu ini bukan kerajaan,” tuturnya.

Baginya sosok Gibran Rakabuming Raka membuka bangsa Indonesia kepada paradigma baru bangsa akan dipimpin anak muda kedepannya. Sebuah terobosan yang baik karena anak muda lebih cenderung melihat masa depan dan Gibran juga bisa mewakili suara-suara dari Gen Z dan kaum muda.

“Gibran memiliki cara pikir dengan pola out of the box itulah ciri khas gaya berpikir anak muda. Pasangan Prabowo dan Gibran sangat-sangat ideal dan baik untuk memimpin bangsa Indonesia kedepannya,” pungkasnya. ●RDR



“Kita kan perlu mengisi ruang publik dengan narasi-narasi pencerdasan, jangan kita perkosakan mekanisme hukum, asas hukum dengan egosentris politik kita”

*Habiburokhman*



# USULAN HAK ANGKET POLEMIIK MK MAKIN RUWET

**Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, mengusulkan agar DPR mengugurkan hak angket terkait polemik yang terjadi saat ini di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK).**

Masinton mengungkit Putusan MK yang berkaitan dengan perubahan aturan terkait batas usia seseorang untuk bisa berkompetisi sebagai capres dan cawapres. Adanya perubahan tersebut menjadi pertimbangan Masinton untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga produk dari reformasi itu.

“Konstitusi adalah roh dan jiwa semangit sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi, kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Konstitusi, tentu bagi kita semua Bapak/Ibu kita yang hadir di sini sebagai roh dan jiwa bangsa kita. Konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut,” kata Masinton Hal saat interupsi Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.

Politisi Fraksi PDIP ini mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut-pautnya dengan pasangan capres-cawapres tertentu. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

Protesnya kali ini berkaitan dengan upaya menjaga mandat konstitusi, mandat reformasi, dan demokrasi. Ia menilai, saat ini Indonesia berada dalam ancaman-ancaman terhadap konstitusi, termasuk juga mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan itu, Masinton

mengajukan hak angket DPR terhadap MK. Untuk itu, dalam interupsinya, ia mengusulkan untuk DPR melakukan hak angket.

Anggota DPR RI, Achmad Baidowi, mengatakan, usulan hak angket terkait dengan putusan MK soal batas usia capres/cawapres tengah dikaji oleh fraksi di lembaga itu.

“Biasanya berdasarkan undang-undang, hak angket dilakukan kepada pemerintah. Sementara itu, angket yang hari ini adalah angket kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Baidowi dalam diskusi daring bertema Konsekuensi Putusan MKMK di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2023.

Politisi PPP itu mengatakan, DPR memiliki hak pengawasan. Putusan MK tersebut nantinya bisa diuraikan mulai dari alasan putusan hingga kaitannya dengan pemerintah.

“Kenapa timbul putusan MK bisa seperti itu? Apa hubungannya dengan Pemerintah? Dan seterusnya,” ujar Baidowi.

Namun, kata dia, ide hak angket tersebut merupakan hak politik konstitusional yang diajukan oleh Masinton

Pasaribu saat Rapat Paripurna DPR.

“Yang lucunya lagi penyampaian Masinton di rapat paripurna dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Jadi, kami ini serba repot menyampaikan usul dalam forum resmi dilaporkan ke MKD,” ujar Baidowi.

Dia menegaskan pula bahwa penyampaian pendapat di ruang konstitusional seperti rapat paripurna telah dilindungi oleh undang-undang.

“Kalaupun kemudian kami berpendapat melalui forum-forum resmi yang dilindungi undang-undang, lalu dilaporkan, jangan-jangan 580 anggota DPR jadi takut (berpendapat) semua nanti,” kata Baidowi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai, putusan MK soal usia capres dan cawapres tak bisa dijadikan obyek hak angket DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyatakan, hak angket semestinya hanya berlaku dalam konteks pengawasan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Tak bisa menyentuh lembaga yudikatif.

Habiburokhman menganggap upaya Masinton membuat banyak pihak kebingungan. Ia pun meminta agar urusan politik tidak lantas digunakan untuk mengintervensi putusan hukum.

“Boleh kita politisi punya sikap politik, punya idealisme politik sendiri, ya berbeda satu sama lain, tapi jangan perkosakan sistem hukum, jangan atas nama politik, apa yang menjadi hal dasar dalam hukum kita abaikan,” tutur ujar Habiburokhman.

Terakhir, ia berharap agar para politisi menyuguhkan narasi yang mencerdasakan publik jelang Pilpres 2024. “Kita kan perlu mengisi ruang publik dengan narasi-narasi pencerdasan, jangan kita perkosakan mekanisme hukum, asas hukum dengan egosentris politik kita,” ucap dia.

Di sisi lain, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, menyambut baik rencana DPR untuk membuat hak angket MK. Sebab, hal itu merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

“Hak angket, ya baik itu saya kira supaya DPR itu juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasannya.

Hak-hak DPR itu banyak yang enggak dipakai, hak angket, hak bertanya. Itu bagus itu, saya dukung saja,” ujar Jimly.

Jimly mengatakan, DPR memang harus menggunakan fungsinya untuk pengawasan, termasuk menggunakan hak angket. Mekanismenya pun sudah diatur.

“Ada di dalam Tata Tertib (DPR), angket itu kan penyelidikan. Ada hak bertanya, ada interpelasi, itu pertanyaan kelembagaan hak bertanya individu anggota. Interpelasi itu pertanyaan institusi. Hak angket itu sudah lebih maju lagi penyelidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyebutkan, hak angket DPR tak bisa mengubah putusan MK soal syarat usia capres dan cawapres. Kendati DPR menggunakan hak angketnya, MK melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

“Tidak bisa hak angket DPR serta merta mengubah putusan MK berubah, kan sifatnya final and binding (final dan mengikat),” kata Feri.

Bahkan, menurut Feri, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tak bisa menjadi objek hak angket DPR. Sebabnya, hak angket tidak bisa digunakan untuk mengusut lembaga peradilan.

Feri bilang, lembaga peradilan mana pun bersifat merdeka dan tidak bisa diintervensi lembaga lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, yang bisa diselidiki DPR lewat hak angketnya terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah dugaan nepotisme yang belakangan jadi perhatian. DPR bisa saja menyelidiki dugaan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti presiden, dalam polemik putusan MK ini.

“Kalau pendapat DPR menyatakan ada pelanggaran hukum yang melibatkan presiden, maka presiden yang akan terdampak,” ujar Feri.

Feri menyebut, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya dapat diubah melalui putusan MK juga. Artinya, harus ada pihak yang mengajukan uji materi ketentuan syarat usia capres-cawapres ke MK.

Ke depan, hasil hak angket DPR dapat dijadikan landasan untuk mengajukan uji materi ketentuan ini ke MK. Selain itu, hasil penyelidikan MKMK juga bisa menjadi dasar uji materi, seandainya MKMK memutuskan ada dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam putusan ini.

“Itu akan menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan. Atau publik bisa juga mengajukan permohonan pengujian kembali dengan alasan berbeda, lalu putusan MKMK dan hak angket DPR bisa jadi alat bukti di dalam persidangan,” jelas peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini. •RDO





“Terkait dengan pidana, kami tidak akan mentolerir hoaks-hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Banyak kan terjadi 2019 dan kami ambil tindakan tegas”

*Semuel Abrijani Pangarapan*

# BERITA HOAKS MAKIN MELONJAK

**Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memastikan Satuan Tugas Antihoaks yang ada di bawah tanggung jawabnya bekerja semakin intensif menjelang Pemilu Serentak 2024.**

Satgas Antihoaks tersebut semakin gencar bekerja mengingat di masa tahun politik ini hoaks yang berpotensi memecah belah dan mengandung konten sensitif telah meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kami memiliki Satgas Antihoaks di Kementerian Kominfo dan memang kami bekerja semakin rajin mengingat tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat mana yang hoaks dan berita palsu,” kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2023.

Budi memastikan Kementerian Kominfo tetap akan mengambil posisi netral selama menangani hoaks politik yang beredar pada periode menjelang Pemilu 2024. Semua hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa dipastikan akan ditangani dan diputus aksesnya.

“Pokoknya kami ini Kementerian Kominfo netral posisinya, siapapun kandidatnya, apapun partainya kalau ada hoaks, ada fitnah (di ruang digital), itu bisa kami proses,” tegasnya.

Bahkan, Budi mengatakan untuk konten hoaks yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik langsung kepada masyarakat dipastikan pelaku yang menyebar ataupun yang membuat bisa dijerat sesuai undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, Budi menyebutkan bahwa hoaks dengan muatan isu Pemilu 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam satu tahun terakhir.

“Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,” kata Budi.

Budi mengatakan peningkatan hoaks terkait dengan isu Pemilu itu makin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus meningkat hingga Oktober 2023. Bahkan, dalam data terbaru Kemenkominfo untuk 27 Oktober 2023, sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas.

Penyebaran informasi tidak benar terkait pesta demokrasi lima tahunan itu paling banyak ditemukan melalui media sosial, khususnya di Facebook.

“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.

Meski begitu ditemukan juga hoaks terkait Pemilu di media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, SnackVideo, Twitter, dan Instagram. Budi mencontohkan beberapa isu hoaks yang telah ditangani Kementerian Kominfo terkait Pemilu, di antaranya seperti disinformasi “Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia”. Kementerian juga menemukan hoaks tentang “Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan”.

“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu,” kata Budi.

Dia menyebutkan kehadiran hoaks di ruang digital Indonesia itu telah menciptakan information disorder (gangguan informasi), khususnya terkait dengan pesta demokrasi yang harusnya disambut dengan positif.

Maka, Budi mengharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa memberi perhatian lebih sebelum membagikan informasi di media sosial maupun melalui aplikasi pesan instan. Dengan demikian semua pihak bisa terlibat untuk mencegah peredaran hoaks terkait Pemilu 2024 yang berpotensi menurunkan kualitas

demokrasi, bahkan bisa menimbulkan polarisasi.

“Seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mendorong kampanye ‘Awat Hoaks Pemilu’ sehingga ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu,” ujar Budi.

Kementerian kominfo juga mengingatkan bahwa penyebar hoaks terkait Pemilu 2024 berpotensi dijera hukum apabila konten yang disebarkan mengandung narasi yang bisa memicu kerusuhan.

“Terkait dengan pidana, kami tidak akan mentolerir hoaks-hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Banyak kan terjadi 2019 dan kami ambil tindakan tegas,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangarapan.

Dalam hal penanganan kasus hoaks selama Pemilu 2024, Kementerian Kominfo akan berkolaborasi dengan Polri apabila ditemukan konten-konten yang berpotensi menimbulkan perpecahan, bahkan konflik di tengah masyarakat.

Menurut Semuel, jika ditemukan hoaks dengan intensi memecah masyarakat, maka pemerintah dapat menjerat pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut dengan UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi yang mengatur soal penindakan terhadap kasus penyebaran berita bohong itu memuat bahwa pelaku dapat terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal penanganan hoaks Pemilu 2024, Kemenkominfo memiliki tiga strategi untuk menciptakan ruang digital Indonesia bisa aman dan nyaman bagi semua masyarakat. Pertama dengan menggalakkan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dari bahaya hoaks dan cara mencegahnya di Pemilu 2024. Kementerian Kominfo juga telah berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk melawan penyebaran hoaks.

Kedua, Kementerian Kominfo mengadakan patroli siber yang dilakukan setiap saat secara rutin sehingga konten-konten yang bermuatan negatif bisa ditekan penyebarannya.

Terakhir, Kementerian Kominfo juga menyediakan ruang pengaduan masyarakat terkait hoaks Pemilu 2024, sehingga masyarakat bisa berperan aktif menjaga ruang digital produktif.

Bagi masyarakat yang ingin mengadukan temuan konten negatif di ruang digital termasuk terkait hoaks, masyarakat bisa mengakses situs web aduankonten.id.

Menkominfo Budi juga membagikan tiga kiat kepada masyarakat agar tidak disesatkan oleh informasi yang tak benar atau hoaks. “Pertama jangan terpancing berita sensasional yang memicu emosi, yang biasanya membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu,” kata Budi.

Justru ketika menemukan berita atau informasi dengan tampilan atau judul sensasional ada baiknya masyarakat tidak langsung membagikan dan justru melakukan “check and recheck”. Apalagi ketika informasi tersebut ditemukan di media sosial maupun aplikasi pesan instan, ada baiknya masyarakat melakukan pengecekan fakta ke sumber tepercaya di mesin pencarian gawainya.

“Kedua, cari faktanya dari sumber berita yang bisa dipercaya dan memiliki reputasi baik. Jadi informasi tersebut pasti berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif,” ujar Budi.

Budi mengatakan berita dari wartawan, khususnya yang medianya terdaftar di Dewan Pers, bisa menjadi salah satu rujukan untuk mencari kebenaran dari sebuah peristiwa ataupun informasi viral.

Rujukan lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memastikan sebuah informasi hoaks atau tidak ialah situs web besutan Kementerian Kominfo dengan alamat <https://kominfo.id/inihoaks>

Agar lebih meyakinkan, masyarakat bisa mencari informasi dari beragam sumber yang berbeda sehingga informasi yang diterima semakin kaya dan menegaskan hal itu adalah kebenaran atau bukan.

Memasuki masa menjelang Pemilu 2024 yang akan menjadi salah satu peristiwa penting di Indonesia, kiat dalam menangkal hoaks itu diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Harapannya masyarakat tidak lagi terkecoh oleh informasi tidak benar dan tetap menjaga ruang digital Indonesia selama masa pesta demokrasi berlangsung tetap aman, nyaman, dan sehat.

“Kepada seluruh masyarakat dalam mendukung pesta demokrasi, mari kita bersama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks dan tentu tidak membuat hoaks. Kami berharap bersama-sama kita dapat mewujudkan Pemilu Damai 2024,” tegasnya. ●RDO



“Hal ini sudah dapat diprediksi sebelumnya ketika Prabowo secara resmi meminang Gibran sebagai cawapres, dengan status masih anggota PDIP”

*Hasyibulloh Mulyawan*



# PDIP SIBUK SERANG JOKOWI

**Hubungan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo terus memanas pasca Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.**

**A**nalisis politik Citra Institute, Efriza, mengatakan, PDIP saat ini terus menyerang Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, perlawanan PDIP terhadap Presiden Jokowi bisa dilihat dari permintaan pengajuan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, gugatan yang dikabulkan itu membuat Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang di 2024.

Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga pernah menyindir Kaesang Pangarep yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini menunjukkan bahwa partai banteng sangat sakit hati kepada Presiden Jokowi.

“Ini menunjukkan PDIP sangat sakit hati kepada Jokowi dan keluarganya, utamanya Gibran dan Kaesang,” kata Efriza kepada Info Indonesia, Minggu, 5 November 2023.

Dia menyampaikan, PDIP ingin sekali mencoret Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dari keluarga besar banteng. Namun, Efriza ragu PDIP melakukan tersebut. Kata Efriza, PDIP pastinya lebih ingin membangun citra yang bisa merugikan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.

“Sehingga bukan semata tidak bisa move on, tetapi memang ingin mencoret nama Jokowi dan Gibran secara personal dengan permainan atas persepsi publik. Jika dipelajari, ini adalah strategi PDIP biar tak mendapat respons negatif dari masyarakat karena PDIP pasif, datar, dan terkesan diam saja,” tutur Efriza.

Dia menilai, PDIP pastinya memiliki strategi tersendiri untuk melakukan perlawanan

terhadap Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Disampaikan Efriza, PDIP saat ini sedang mencari celah untuk menjatuhkan elektoral pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, PDIP bisa memanfaatkan hal itu untuk mendongkrak elektoral Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Mereka juga melakukan strategi berusaha meningkatkan elektabilitas dan perolehan suaranya, sekaligus PDIP menjadi aktor yang mengawal ekspresi kekesalan masyarakat terhadap penguasa politik Jokowi dan Gibran. Ini dilakukan dengan berharap terjadinya peralihan suara pendukung loyal Jokowi secara personal kepada PDIP,” jelas Efriza.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu, jika strategi itu dimainkan oleh PDIP, maka akan sangat menguntungkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun di sisi lain juga bisa menjadi bumerang bagi PDIP.

“Strategi ini memang bagus. Hanya juga bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Sebab, memungkinkan masyarakat jengah dan sekaligus kesal dengan menganggap PDIP sekadar menjadikan kekesalan masyarakat terhadap Jokowi

tuk mendongkrak suara mereka,” terang Efriza.

Efriza menambahkan, jangan sampai masyarakat menganggap perlawanan yang dilakukan PDIP terhadap Presiden Jokowi itu atas dalih membela kepentingan rakyat.

“Seolah-olah menyerang Jokowi untuk kepentingan masyarakat, padahal Jokowi adalah kadernya sendiri, Jokowi adalah presiden yang terpilih dari PDIP. Artinya ada upaya strategi politik dari PDIP, juga strategi ini memungkinkan blunder berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap PDIP,” tutur Efriza.

Dia mengatakan, jika PDIP terlalu agresif terhadap Jokowi, maka partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan kehilangan kepercayaan rakyat. Hal ini, lanjut Efriza, akan sangat merugikan PDIP. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki tahapan kampanye.

“Sehingga membuat masyarakat malah tak mempercayai PDIP, karena ketidakjelasan PDIP, dalam hal misalnya menyerang Jokowi tapi Jokowi adalah tetap bagian dari kader PDIP,” ucap Efriza.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengatakan, persekutuan antara PDIP dengan Presiden Jokowi ini me-

mang sudah diprediksi pasca Koalisi Indonesia Maju mengusung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

“Hal ini sudah dapat diprediksi sebelumnya ketika Prabowo secara resmi meminang Gibran sebagai cawapres, dengan status masih anggota PDIP,” kata Iwan.

Selain itu, ditambah polemik yang hadir karena putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ketika putusan itu dikabulkan, banyak pihak menilai bahwa MK sedang mencederai demokrasi.

“Tidak hanya itu, polemik putusan MK yang dinilai mencederai demokrasi juga menjadi pemicu kekecewaan PDIP. Sehingga, kekecewaan PDIP bukan tanpa alasan,” kata Iwan.

Dia menyampaikan, polemik-polemik yang terjadi saat ini, khususnya putusan MK, memang perlu direspons oleh seluruh pihak termasuk elite politik. Sebab, persoalan ini juga sangat mempengaruhi pencapresan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Jika tidak disikapi secara tepat, konfrontasi kedua kubu paslon capres-cawapres, Ganjar-Mahfud vs Prabowo-Gibran justru akan merugikan kedua belah pihak,” kata Iwan.

Di satu sisi, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa mengambil keuntungan dari persekutuan PDIP dengan Presiden Jokowi. Sebab, pasangan AMIN bisa membentuk opini publik terkait permasalahan PDIP dengan Presiden Jokowi. Sehingga, nantinya pasangan AMIN akan mendapatkan perhatian publik.

Maka dari itu, Iwan menyarankan kepada tim pemenangan Ganjar dan Prabowo untuk tetap berhati-hati dalam menanggapi situasi politik yang saat ini mulai memanas.

“Sehingga menurut saya kondisi politik akhir-akhir ini perlu dicermati dan disikapi dengan tepat oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran,” tandas Iwan. •RDO





“Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan bermunculan karena Pak Surya Paloh dan NasDem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan”

Anies Baswedan

# NASDEM MERASA DIZALIMI KPK

**Mencanangkan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024 sejatinya sejalan dengan restorasi politik yang digagas Partai Nasdem. Namun, langkah politik itu kini dipertaruhkan.**

**S**epanjang pemerintahan Jokowi, misalnya, tak kurang enam menteri berasal dari Partai Nasdem. Pada periode kekuasaan Jokowi-Kalla (2014-2019), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta Menteri Perdagangan diduduki kader Nasdem. Pada pemerintahan Jokowi periode kedua (2019-kini), selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian serta Menteri Komunikasi dan Informatika juga kader Nasdem.

Akan tetapi, di ujung periode kepemimpinan Jokowi, nasib restorasi politik Nasdem tengah dipertaruhkan, tidak hanya dalam kabinet pemerintahan, tetapi juga terkait dengan masa depan politik partai ini.

Bermula dari inisiatif Nasdem menggagas konvensi capres 2024 pada pertengahan 2021. Konvensi ini berujung pada keputusan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres dari Nasdem, awal Oktober 2022. Sosok Anies dalam berbagai hal dikenal berseberangan pandangan dengan Jokowi. Semenjak itu, dan jargon perubahan yang semakin gencar disuarakan, membuat relasi Nasdem dan kekuasaan tak lagi sama seperti sebelumnya.

Belakangan, kader-kader Nasdem yang duduk di pemerintahan, seperti Johnny G Plate, tersingkir dari Menkominfo dan kini tengah dituntut 15 tahun penjara atas perkara dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo. Kemudian, menyusul Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo menyatakan mundur dari jabatannya seusai dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya mengatakan, pihaknya menyebut terdapat aliran dana dari Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem.

“Sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL (Syahrul Yasin Limpo) yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 13 Oktober 2023.

Setelahnya, Partai Nasdem mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Alexander Marwata buntut pernyataannya yang menyebut ada aliran dana eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke partai.

“Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata karena ucapannya. Kami mempertimbangkan,” kata Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2023.

Sahroni menilai, Partai Nasdem sudah rugi di hadapan publik akibat pernyataan Alex Marwata. “Seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi, yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari juga meragukan pernyataan Alex Marwata itu. “Memangnya masih bisa kita percayai keterangan KPK? Dengan proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini, apakah KPK saat ini masih dipercaya memiliki integritas dan

independen?” kata Taufik.

Taufik meragukan keterangan dari KPK, berkaca dari rangkaian proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Dewan Pakar Nasdem. “Mulai dari penggeledahan ketika SYL di luar negeri, pembangunan opini oleh Wakil Menteri Pertanian, seolah-olah SYL hilang padahal baru telat dua hari dari jadwal ketibaan. Lalu pamannggilan penasihat hukum sebagai saksi atas legal opinion-nya,” ujar Taufik.

Taufik menyebut, Alex mengatakan bahwa bukti permulaan penggunaan dana sebesar Rp 13,9 miliar. “Tapi kemudian ia menambahkan bahwa selain itu, penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan tim penyidik yang salah satunya soal aliran uang untuk kepentingan partai Nasdem dalam jumlah yang tidak dirinci hanya disebut miliaran rupiah,” kata Taufik.

“Alex menjelaskan suatu hal yang akan ditelusuri lebih lanjut, yang masih dicari-cari, tapi sudah diangkat ke publik,” ujarnya.

## Banyak Tantangan

Calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengungkapkan

selama satu tahun ini tidak ada tamu yang berkunjung ke rumah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Hal itu terjadi usai Surya Paloh mencalonkan dirinya sebagai capres.

“Dari selama satu tahun ini, Kiai Kholid menyampaikan, ini betul Pak Dahlan dan Pak Rektor (UMS), Pak Surya Paloh menyampaikan, semenjak mencalonkan tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau,” kata Anies di acara Orasi Kebangsaan di Edutorium UMS, Solo, Sabtu, 4 November 2023.

Anies menyebut mereka tidak berani bertamu karena merasa takut sehingga semua menjauh. Menurutnya, tantangan demi tantangan bermunculan usai Surya Paloh dan Partai NasDem memutuskan untuk melakukan gerakan perubahan.

“Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan bermunculan karena Pak Surya Paloh dan NasDem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan,” ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku langsung menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dia pun menyinggung soal rombongan yang lebih nyaman.

“Kita langsung berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup enak ya syukur hidup tenang mengikuti rombongan hari ini pasti nyaman, betul tidak?” ucapnya.

“Tapi, Bapak Ibu sekalian, ini lah ciri yang mau mengambil tanggung jawab, kita tidak khawatir apa yang ditulis wartawan, kita nggak perlu khawatir yang ditulis media sosial tapi kita lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan,” lanjutnya.

Anies melanjutkan, satu tahun berlalu, kini dia bisa mendaftar ke KPU sebagai bakal calon presiden bersama Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Anies juga telah mengucapkan permohonan maaf bagi yang kecewa.

“Satu tahun sudah terlewat bisa mendaftarkan dan saat itu saya sampaikan mohon maaf bila mengecewakan mereka, mereka yang pesimis bahwa kapal ini tidak bisa berlayar,” pungkasnya. ●RDO



“Biar mapping elektoral semakin meluas. Kaesang di PSI, Gibran di Golkar, saya pikir cukup saling melengkapi”



Subiran Paridamos

# GOLKAR DAN PSI REBUTAN GIBRAN

**Manuver Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, memilih menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto menyisakan pertanyaan soal statusnya sebagai kader PDIP. Kini, Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merayu putra sulung Presiden Jokowi itu untuk berganti kendaraan politiknya.**

**S**ekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan, Gibran Rakabuming Raka belum bergabung dari partai beringin. Partai Golkar lebih menyerahkan keputusan tersebut kepada Gibran.

“Mengalir saja dulu ya, Pak Gibran kan belum memutuskan, biarlah kita tunggu keputusan Pak Gibran berlabuh ke mana,” kata Lodewijk kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 31 Oktober 2023.

Lodewijk mengatakan, Partai Golkar memiliki program inovasi terkait dengan kaderisasi dan keanggotaan. Namun, dia memastikan bahwa sampai saat ini Gibran belum bergabung dengan Partai Golkar.

“Menurut saya sampai sekarang nama Pak Gibran belum masuk belum ada,” kata Lodewijk.

Dia menjelaskan, untuk menjadi kader Partai Golkar harus ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Seorang yang

ingin bergabung dengan Partai Golkar harus mengikuti aturan yang berlaku di internal partai.

“Dia harus mengisi formulir, bukan semata-mata dikasih KTA, ada prosedur yang harus dilewati,” ujar Lodewijk.

Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengaku pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada Gibran yang memiliki hak dalam menentukan masa depan politiknya.

“Kalau saya pikir begini, pada dasarnya, seorang Gibran memiliki hak politik dan hak konstitusi untuk kebebasan memutuskan dia nanti akan bergabung di mana. Apakah tetap di PDIP, atau nanti dia akan bergabung di Golkar, atau partai mana,” kata Maman, Rabu, 1 November 2023.

Maman mengatakan, persoalan status Gibran saat ini bukanlah menjadi permasalahan bagi partainya. Sebab, fokus Golkar sekarang untuk mendukung penuh pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Terkait positioning beliau di partai mana segala macam, saya pikir itu tidak terlalu menjadi permasalahan yang terlalu besar bagi kita. Yang penting kita harus berjalan dulu, tim ini harus bergerak secara komitmen,” tutur Maman.

Di sisi lain, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, sudah mengajak kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung ke partai naungannya.

Kaesang mengajak Gibran karena saat ini status keanggotaan kakak sulungnya di PDIP tidak jelas selepas menjadi cawapres Prabowo Subianto.

“Pak Wali (Gibran) kan jawabannya gitu. Mas mau nggak (gabung PSI)? Mas wali? Ya, jawabannya cuma, ya. Udah, cuma gitu,” kata Kaesang usai mengunjungi posko organ relawan Jokowi, Tim-

bul Sehati Indonesia, di Jalan Penjernihan Dalam, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis, 2 November 2023.

Pengamat politik Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai, karena begitu besar tekanan politik yang diberikan PDIP kepada Gibran, langkah baiknya putra sulung Presiden Jokowi itu bergabung dengan Partai Golkar.

“Idealnya Gibran segera memilih masuk ke Golkar supaya mendapatkan suaka dan dukungan politik yang lebih kuat, karena kita tahu Golkar ini partai besar dan nomor dua perolehan kursi di Parlemen,” kata Subiran.

Menurutnya, bergabung PSI tidak akan menguntungkan bagi Gibran. Apalagi, partai tersebut sudah dipimpin oleh sang adik, Kaesang Pangarep. Selain itu, Gibran juga tidak mendapatkan coatail effect atau efek ekor jas jika bergabung dengan partai anak muda itu.

“Biar mapping elektoral semakin meluas. Kaesang di PSI, Gibran di Golkar, saya pikir cukup saling melengkapi,” kata Subiran.

Dia mengatakan, Gibran akan lebih untung jika bergabung dengan Partai Golkar. Sebab, Partai Golkar merupakan partai yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Apalagi, partai pimpinan Airlangga Hartarto itu merupakan partai pemilik suara nasional terbanyak ke dua di Pemilu 2019.

Gibran juga pertama kali diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto oleh Partai Golkar. Maka dari itu, Gibran lebih memiliki kans bergabung dengan partai beringin.

“Lagi pula Gibran kan pertama kali diusung oleh Partai Golkar sebagai cawapres. Jadi secara kalkulasi politik Gibran lebih tepat masuk Golkar. Istilahnya balas jasa terima kasih karena sudah di-backup Golkar,” kata Subiran.

Dia menilai, Gibran dan Partai Golkar saling membutuhkan dan melengkapi.

Di satu sisi, Golkar mendapatkan pengaruh politik Jokowi dan dukun-

gan anak-anak muda.

“Keduanya saling simbiosis mutualisme. Golkar akan dapat Jokowi Effect dan elektoral Gen Z dan milenial,” kata Subiran.

Di sisi lain, Gibran juga akan mendapatkan kekuatan politik dari Partai Golkar. Gibran juga bisa memanfaatkan kekuatan politik dari Partai Golkar untuk memberikan perlawanan kepada PDIP.

“Gibran akan mendapatkan suaka politik dari Golkar di parlemen dan punya bodyguard untuk counter isu yang dilancarkan elite PDIP,” jelas Subiran.

Partai Golkar juga dinilai akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Gibran. Sebab, infrastruktur politik yang dimiliki Partai Golkar itu sangat kuat. Banyak tokoh atau elite politik yang tergabung di Partai Golkar.

“Tentu berpengaruh besar. Golkar kita tahu partai yang mesin politik dan infrastrukturnya cukup kuat dan mengakar, tokoh dan figurnya juga merata,” jelas Subiran.

Subiran menambahkan, keberadaan tokoh dan elite politik di Partai Golkar juga akan sangat menguntungkan Gibran. Dia bisa belajar banyak mengenai politik praktis dengan tokoh-tokoh tersebut.

“Sehingga, Gibran bisa diasuh dan diasah lebih matang di partai tersebut,” ujar Subiran.

Partai Golkar juga dinilai akan all out mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres. Sebab, Gibran sudah menjadi bagian dari internal partai beringin.

“Selain itu, jangka pendeknya ya Golkar akan lebih fight lagi dalam kemenangan Prabowo-Gibran karena merasa Gibran adalah internal. Jadi, Golkar dan Gibran ini komplementer,” ucap Subiran.

Dukungan penuh yang diberikan Partai Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara duet tersebut di Pilpres 2024.

“Dengan dukungan penuh dari Golkar, saya pikir Prabowo-Gibran ini punya potensi memenangkan Pilpres 2024,” pungkasnya.

•RDO





“Pasangan ini minim resiko tidak ada masa lalu kelam dan tangannya tidak berdarah. Ganjar orang biasa dan pekerja keras dan Mahfud MD cari rekam jejaknya apa ada masalah”

*Tun Teja*

# KADER DAERAH BANGGA JADI PENGUSUNG GANJAR - MAHFUD

**Ada harapan yang besar terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sosok Menko Polhukam, Mahfud MD menjadi simbol penegakan hukum di Indonesia karena ketegasan dan keberaniannya dalam mengungkap kasus hukum besar.**

Paslon ini juga menjadi solusi terbaik untuk rakyat Indonesia yang selalu merindukan kepastian hukum dan kesejahteraan hidup di Indonesia. Terlebih lagi hukum di Indonesia dianalogikan pisau yang tumpul diatas namun sangat tajam ke bawah.

Di Pilpres 2024 ini pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung penuh koalisi PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Hanura.

Bagi kader partai di daerah, menjadi sebuah kebanggaan saat partainya mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Ada banyak kelebihan dan harapan pada pasangan ini sehingga mereka yakin Ganjar - Mahfud akan menang di Pilpres 2024.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Tun Teja menjelaskan, sudah menjadi jaminan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD apabila terpilih yakni melindungi wong cilik dan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dalam bidang hukum, kesejahteraan dan lainnya.

“Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati mengatakan Mahfud dikenal sebagai pendekar hukum dan kerap membela rakyat kecil. Itu alasan utama Mahfud MD cocok mendampingi Ganjar,” kata Caleg DPRD kota Palembang Dapil 2 Sukarami, Alang Alang Lebar dan Kemuning ini.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD disebutkan pasangan terbaik untuk bangsa dan negara bukan paslon karbitan sehingga bisa dipercaya dan diandalkan. Indonesia 5 tahun kedepan harus dipimpin pasangan yang layak agar keamanan dan kenyamanan dirasakan.

“Pasangan ini minim resiko tidak ada masa lalu kelam dan tangannya tidak berdarah. Ganjar orang biasa dan pekerja keras dan Mahfud MD cari rekam jejaknya apa ada masalah,” tegasnya.

Terkait track record Mahfud MD maju ke depan saat kasus Sambo dan beragam kasus hukum lainnya di Indonesia. Kepastian hukum diperjual belikan atau istilah hukum yang tajam kebawah bukan keatas tidak akan lagi terjadi.

“Kita tidak mau terjadi lagi seperti di era order baru korupsi dimana-mana. Mau kerja harus ada katebelece orang dalam baru bisa masuk. Untuk negara kuat harus dipimpin orang yang tahu hukum agar tidak diatur oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu dan kepentingan kaum asing,” jelasnya.

Dia menyebutkan 50 persen pemilih muda di Pilpres 2024 ini, dipastikan akan menentukan

pilihan secara cerdas. Pemilih muda bisa melihat rekam jejak dan semua prestasi para paslon bukan sekadar modal muda tetapi karbitan alias belum layak.

“Rakyat sekarang sudah pintar 50 persen anak muda mereka semua melek teknologi. Tentunya tidak seperti dulu bisa di-cebong kampret-kan. Mahfud MD kalau urusan hukum bukan hanya sekedar pendekar hukum, dia itu diibaratkan kamus hukum di Indonesia itu sendiri,” tuturnya.

Dijelaskannya, Megawati menyebut hukum di Indonesia tidak boleh terbungkam. Dia yakin jika paslon diusung oleh PDIP menang soal hukum, kedepannya akan dibela Mahfud. Tidak ada lagi alasan rakyat memilih orang yang tidak layak untuk memimpin bangsa dan negara ini.

“Sekali lagi saya ulangi kita memilih pemimpin itu untuk kemajuan Indonesia 5 tahun kedepan,” pungkasnya.

Rasa bangga yang sama disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Febuar Rahman setelah partainya, Perindo berkoalisi dengan PDIP mendukung penuh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Menurutnya dua pasangan ini bisa saling melengkapi dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing.

“Ganjar Pranowo di bidang birokrasi dan Mahfud MD di bidang hukum, keduanya pasangan ideal untuk memimpin

Indonesia,” jelasnya.

Indonesia memang membutuhkan paslon yang bisa mengakhiri tentang kepastian hukum di Indonesia sudah kronis. Pendekar Hukum Mahfud MD bisa mengatasi itu apabila rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada keduanya.

“Hukum di Indonesia harus direformasi oleh kedua pasangan ini seharusnya rakyat memilih mereka di Pilpres 2024 nanti. Karena di Indonesia tidak ada kepastian hukum, hukum sebagai komoditi dan hukum dijadikan alat untuk kepentingan politik. Semua itu harus diberantas oleh pemimpin yang bisa melakukannya yang tepat itu adalah Mahfud MD yang paham soal hukum,” jelasnya.

Hukum di Indonesia sangat dirasakan oleh wong cilik karena terkesan tajam kebawah dan tumpul di atas. Wong cilik merasa tersiksa dengan persoalan-persoalan hukum dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan hukum menindas rakyat kecil.

“Bagaimana mahalnya dan ribetnya urusan hukum di Indonesia. Rakyat kecil menjerit karena kasus hukum yang mereka jalani dipersulit. Baik itu hukum perdata apalagi hukum pidana yang sangat memusingkan kepala wong cilik. Karena itu oknum-oknum yang memberlakukan hukum hanya tajam kebawah harus diberantas. Kepastian hukum untuk seluruh rakyat Indonesia sangat penting,” jelasnya.

Namun dia sedikit ragu kalau melakukan tindakan hukum di jajaran tertinggi seperti KKN. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa memastikan kepastian hukum namun untuk menindak KKN masih sulit.

“KKN tidak bisa diselesaikan oleh pasangan ini saja. Untuk memberantas KKN harus ada sistem dan birokrasinya tidak cukup hanya presiden dan wakil presiden saja. Tetapi bisa juga diatasi secara perlahan-lahan selama 5 tahun kedepan,” tuturnya.

Dia berharap apabila Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih jangan sampai mengecewakan rakyat Indonesia janji untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia harus diwujudkan.

“Jangan kecewakan rakyat Indonesia lakukan yang terbaik apabila terpilih,” harapnya. ●RDR



**“Mulai tampak Prabowo-Gibran berhasil menarik lebih banyak dukungan basis Jokowi di 2019, dan itu mengalahkan Ganjar-Mahfud”**

*Kennedy Muslim*



# PRABOWO GIBRAN AMBIL ALIH JATIM

**Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli dua kandidat lainnya dalam survei elektabilitas di Jawa Timur, provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia.**

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres di Jatim, duet Prabowo-Gibran berada di urutan teratas dengan raihan 40,1 persen.

Di posisi kedua ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan raihan 35,9 persen. Lalu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang elektabilitasnya hanya 22,2 persen.

“Masih ada 1,8 persen responden yang belum menentukan pilihan,” kata Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, di Surabaya, Rabu, 1 November 2023.

Baihaki pun mengungkapkan faktor utama yang menjadi pendorong elektabilitas Prabowo di Jatim. Faktor yang dimaksud adalah bergabungnya Gibran yang membuat Prabowo mendapat limpahan suara loyalis Jokowi di Jatim.

“Jatim merupakan basis Jokowi selama dua kali Pilpres di 2014 dan 2019. Jadi, faktornya loyalis Jokowi yang dulunya banyak merapat ke Ganjar, kini mulai beralih ke Prabowo,” ujarnya.

Baihaki juga mengungkapkan banyaknya pendukung PDIP yang mengalihkan dukungan dari Ganjar ke Prabowo setelah pemilihan Gibran menjadi cawapresnya. Terutama pendukung PDIP yang berada di wilayah Mataraman.

“Selama ini Prabowo lemah di Mataraman. Begitu ada Gibran, bisa mengangkat suara Prabowo di basis-basis PDIP di Mataraman,” kata Baihaki.

Baihaki menjabarkan, jika dilihat secara angka, ada sebanyak 33,7 persen pemilih PDIP yang lebih memilih pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sementara 66,3 persennya memilih pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP. Artinya, kata dia, tidak ada pemilih PDIP yang mengalihkan dukungan ke pasangan Anies-Muhaimin.

Faktor Gibran

dan Jokowi mempengaruhi pemilih PDIP di Jatim beralih dari Ganjar ke Prabowo. Jadi mereka kalau partai tetap memilih PDIP, tapi capresnya Prabowo,” kata Baihaki.

Dalam survei ARCI, PDIP tetap unggul, namun dalam batas margin of error. Adapun elektabilitas PDIP di angka 17,8 persen. Kemudian disusul PKB 15,2 persen. Di posisi ketiga ada Gerindra 15,1 persen dan Golkar melengkapi 4 besar di angka 14,1 persen.

Baihaki menyebut keunggulan PDIP di Jatim masih sangat tipis dan berada dalam angka margin of error. Ia menyebut tiga partai yang ada di bawah PDIP berpotensi menyalip sewaktu-waktu.

“PDIP cenderung menurun pascahubungan panas dengan Jokowi. Karena harus dimengerti, Jatim itu basis Jokowi selama dua kali pilpres dan sekarang sinyal Jokowi kan ke paslon yang bukan diusung PDIP. Jadi PKB, Gerindra punya peluang menyalip PDIP. Sementara Golkar punya potensi juga minimal menyalip PKB atau Gerindra dan masuk tiga besar,” katanya.

Baihaki menyebut Golkar diam-diam bisa membahayakan. Sebab, Golkar punya nilai plus karena menjadi partai yang mendeklarasikan pertama Gibran sebagai cawapres.

“Golkar punya peluang mendapat coattail effect dari Gibran, di mana loyalis Jokowi di Jatim bisa berbelok dari awalnya PDIP kemudian ke Golkar karena ada faktor Gibran. Kalau Gerindra jelas mendapat limpahan elektoral dari Prabowo Subianto,” jelasnya.

Adapun angka elektabilitas parpol lainnya di Jatim yakni Partai Demokrat 10,1 persen, Partai Nas-Dem 5,9 persen, PKS 5,2 persen, PAN 4,5 persen, PPP 4,1 persen,

PSI 1,8 persen, Perindo 1,4 persen, Partai Hanura 0,5 persen, PKN 0,5 persen, PBB 0,2 persen, Partai Gelora 0,1 persen, Partai Ummat 0,1 persen, Partai Garuda 0 persen, dan Partai Buruh 0 persen. Sementara sisanya 3,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Survei ARCI dilakukan pada 22-27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Keunggulan Prabowo-Gibran juga tercatat dalam survei yang dilakukan Polling Institute. Lembaga survei itu menyebut duet Prabowo-Gibran banyak dipilih oleh masyarakat di Jatim.

“Prabowo-Gibran unggul di wilayah Jawa Timur karena ditopang oleh beberapa faktor,” kata Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, melalui keterangannya di Surabaya, Kamis, 2 November 2023.

Menurutnya, hal itu berdasarkan lembaga survei Polling Institute periode 25-28 Oktober 2023 dengan memperlihatkan elektabilitas pasangan di beberapa wilayah.

Berdasarkan simulasi, pasangan Prabowo-Gibran unggul di Jatim dengan hasil 33,0 persen suara. Raihan tersebut berhasil mengalahkan Anies-Muhaimin 26,5 persen dan Ganjar-Mahfud 25,3 persen.

Faktor utama Prabowo-Gibran unggul di wilayah Jatim karena ada dukungan kuat dari Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memang memiliki basis yang cukup be-

sar, salah satunya di kalangan Nahdlatul Ulama (NU)

“Analisa sementara karena faktor Presiden Jokowi yang sangat populer di kalangan NU akar rumput di Jatim,” kata Kennedy.

Adanya dukungan kuat dari Presiden Jokowi ini membuat pasangan Prabowo-Gibran mendapat limpahan dukungan dari masyarakat Jawa Timur. Ditambah dengan adanya kedekatan Menteri Pertahanan dengan tokoh-tokoh NU.

Terdapat sejumlah tokoh NU yang mendukung Prabowo menjadi capres seperti Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dan Gus Miftah. Dia mencontohkan, Habib Luthfi memberikan doa penuh dan menyatakan tegas mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu tentu saja membawa pengaruh positif yang berpotensi besar menarik dukungan Nahdliyin untuk mendukung Prabowo-Gibran. Maka tidak heran, elektabilitas pasangan tersebut sangat tinggi di hasil survei, karena banyak yang dukung.

“Elektabilitas Prabowo di Jawa Timur masih kuat, karena punya kedekatan dengan tokoh Islam,” kata Kennedy.

Kennedy menambahkan, pemilih Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 dinilai kian solid memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Basis pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019 lebih banyak memilih Prabowo-Gibran dengan hasil 43,2 persen. Raihan tersebut lebih banyak daripada yang diperoleh Ganjar-Mahfud 39,6 persen dan Anies-Muhaimin 14,7 persen.

“Mulai tampak Prabowo-Gibran berhasil menarik lebih banyak dukungan basis Jokowi di 2019, dan itu mengalahkan Ganjar-Mahfud,” kata Kennedy.

Menurutnya, ini terjadi karena Prabowo-Gibran diasosiasikan sebagai pasangan yang paling direstui Jokowi. Sinyal dukungan itu bisa dilihat dari Jokowi yang kerap mengajak Prabowo dalam kegiatan atau kunjungan kerjanya. Misalnya, saat momen peringatan Hari Santri Nasional 2023 beberapa waktu lalu.

Dalam momen tersebut, turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi di Tugu Pahlawan, Surabaya. Mereka tampak akrab sedang bersama Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sembari mengobrol dan berjalan.

Kennedy melanjutkan, dukungan kuat dari Presiden Jokowi itu mempunyai dampak yang besar bagi Prabowo menjelang kontestasi Pilpres 2024. Tentu ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk menang.

Tak hanya itu, adanya perubahan personalitas juga menjadi salah satu indikator penting Prabowo banyak didukung. Saat ini, Prabowo dilihat jauh lebih tenang dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

“Perubahan Prabowo ini berpotensi keuntungan menarik suara,” pungkas Kennedy. ●RDO

